KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia-NYA Laporan Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 telah dapat kami susun.

Laporan tahunan ini merupakan laporan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembinaan di sektor pembangunan industri dan perdagangan pada tahun 2016, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Laporan ini juga memuat permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan tahun 2016 serta langkah-langkah pemecahannya.

Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan kami. Tidak lupa kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan kinerja yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang kita kerjakan bersama.

Padang, Februari 2017

Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Sumatera Barat

Asben Hendri, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631209 198611 1 003

DAFTAR ISI

Daftar Is Daftar T Daftar G	ngantarsi	i ii iii iv v
BAB I	PENDAHULUAN	1 1 2 2 2
BAB II	KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 2.1 Kebijaksanaan Pembangunan Perindag Sumbar 2.2 Langkah – langkah Strategis 2.2.1 Pernyataan Visi 2.2.2 Pernyataan Misi 2.2.3 Tujuan dan Sasaran 2.2.4 Strategi dan Kebijakan 2.2.5 Struktur Organisasi	3 3 3 4 5 6 7
BAB III	PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TAHUN 2016 3.1 Bidang Industri Agro 3.2 Bidang Industri Non Agro 3.3 UPTD Balai Perekayasaan 3.4 Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk 3.5 UPTD Balai Metrologi 3.6 Bidang Perdagangan Luar Negeri 3.7 UPTD Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) 3.8 Bidang Perdagangan Dalam Negeri 3.9 UPTD Balai Promosi dan Pemasaran 3.10 Sekretariat	10 11 14 17 19 21 24 27 28 32 36
BAB IV	DATA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN TAHUN 2016 4.1 Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan dalam PDRB 4.2 Data Perkembangan Industri 4.3 Data IKM yang difasilitasi Sertifikasi Standarisasi Produk Industri 4.4 Data Perkembangan Ekspor 4.5 Data Perkembangan Impor 4.6 Data Perkembangan SIUP dan TDP 4.7 Data Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditi Agro 4.8 Data Perkembangan Kemetrologian (Tera dan Tera Ulang) 4.9 Data Perkembangan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	40 40 41 42 43 45 46 48 49 50
BAB V	PENUTUP	51 51 52

DAFTAR TABEL

	Ha	laman
Tabel 1	Lokasi dan Hasil Kegiatan Pembentukan Pasar Tertib Ukur Tahun 2016	23
Tabel 2	Struktur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016	40
Tabel 3	Perkembangan Industri di Sumatera Barat Tahun 2011-2015	41
Tabel 4	Potret fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi per Kabupaten/Kota Sumatera Barat Kondisi Sampai dengan Tahun 2016	43
Tabel 5	Nilai Ekspor Non Migas Sumatera Barat Menurut Golongan Barang HS 2 Digit Desember 2015 – Desember 2016	43
Tabel 6	Nilai Ekspor Non Migas Sumatera Barat Menurut Negara Tujuan Desember 2015 – Desember 2016	45
Tabel 7	Nilai Impor Sumatera Barat Menurut Golongan Barang HS 2 Digit Desember 2015 – Desember 2016	45
Tabel 8	Nilai Impor Sumatera Barat Menurut Negara Asal Desember 2015 – Desember 2016	46
Tabel 9	Jumlah Penerbitan SIUP di Sumatera Barat Tahun 2016	47
Tabel 10	Jumlah Penerbitan TDP di Sumatera Barat Tahun 2016	48
Tabel 11	Rekapitulasi Pasar Lelang Komoditi Tahun 2016	49
Tabel 12	Perkembangan Data Tera dan Tera Ulang UPTD Balai Metrologi Tahun 2012-2016	49
Tabel 13	Perkembangan Penerbitan Sertifikat Mutu Tahun 2012-2016	50

DAFTAR GAMBAR

	H	lalamar
Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Realisasi APBD Tahun 2016
Lampiran 2	Realisasi APBN Tahun 2016
Lampiran 3	Pameran yang diikuti Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016
Lampiran 4	Data Tera dan Tera Ulang Alat UTTP Tahun 2012-2016
Lampiran 5	Kekuatan Pegawai di Lingkungan Dinas Perindag Tahun 2016
Lampiran 6	Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2016

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang penyusunan Laporan Tahunan 2016, yang memuat dasar hukum dibentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat beserta tugas pokok dan fungsinya; Maksud dan Tujuan Laporan Tahunan; Ruang lingkup penyusunan laporan tahunan disertai dengan batasan-batasan penulisan laporan agar lebih terarah serta; Sistematika penulisan laporan.

1.1 Latar Belakang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 12 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 dalam Bab XIIIA Bagian Kedua Pasal 40A disebutkan bahwa "*Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan*. Selanjutnya pada Pasal 41A disebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40A Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- 3. Pembinaan dan fasilitasi bidang perindustrian dan perdagangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- 4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- 5. Pelaksanaan tugas di bidang industri agro, industri non agro, perdagangan luar negeri, perdagangan dalam negeri, pengawasan dan pengendalian mutu produk, dan UPTD;
- 6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 telah melaksanakan berbagai kegiatan yang ditunjang dengan dukungan dana, personil serta sarana yang tersedia agar tercapainya sasaran pembangunan ekonomi khususnya industri dan perdagangan di Sumatera Barat.

Sebagai pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2016, maka disusunlah laporan tahunan ini berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk :

- 1. Memberikan penilaian terhadap kinerja operasional pembinaan yang dilaksanakan masing-masing Bidang dan UPTD sebagai evaluasi dari kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
- 2. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari aparat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian sasaran program operasional tahunan yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya dan dana yang disediakan.
- 3. Bahan masukan dalam menyusun dan menyempurnakan program kerja operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan laporan tahunan ini mempunyai batasan-batasan sebagai berikut :

- 1. Tujuan dan Arah Pembangunan, Langkah-langkah Strategis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dan Program Kerja tahun 2016.
- 2. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit.
- 3. Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pemecahan masalah tersebut.
- 4. Rekomendasi tindak lanjut diperlukan sebagai acuan pokok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada tahun berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Tahunan ini adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
 - Bagian ini menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan tahunan, ruang lingkup laporan serta sistematika penulisan.
- BAB II Kebijaksanaan Pembangunan Industri dan Perdagangan

Bagian ini menguraikan Kebijaksanaan Pengembangan Perindag Sumbar dan Langkah-langkah Strategis.

BAB III Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian ini menguraikan kinerja operasional dan kinerja pembinaan masing-masing unit pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV Data Pembangunan Industri dan Perdagangan Tahun 2016

Bagian ini menguraikan perkembangan data industri dan perdagangan selama tahun anggaran 2016.

BAB V Penutup

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai target kinerja pembinaan yang dilakukan pada Sektor Industri dan Sektor Perdagangan selama tahun anggaran 2016.

BAB II KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Bab ini menguraikan gambaran umum kebijaksanaan pengembangan perindustrian dan perdagangan Sumatera Barat; Langkah-langkah strategis pembangunan sektor industri dan perdagangan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun, serta; Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 12 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011.

2.1 Kebijaksanaan Pembangunan Perindag Sumbar

Program pembangunan Provinsi Sumatera Barat diantaranya adalah untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif dan pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Salah satu pola yang sesuai dengan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produktif masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi. Kegiatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada umumnya dan melibatkan masyarakat adalah melalui berbagai sektor usaha antara lain sektor industri dan perdagangan.

Pihak yang paling berperan dalam pengembangan industri dan perdagangan dalam pembangunan ekonomi di Sumatera Barat adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi di bidang Industri dan Perdagangan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Tugas yang diamanatkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 tahun 2012 tentang Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat memegang peran yang strategis dalam pemberdayaan Industri dan Perdagangan di Provinsi Sumatera Barat. Hasil pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang ditargetkan dengan tolok ukur keberhasilan tercermin dalam indikator-indikator sasaran untuk sektor perindustrian berupa pertumbuhan industri, jumlah unit usaha industri dan pengembangan sentra Industri kecil. Hasil-hasil pembangunan sektor perdagangan tercermin dalam indikator-indikator makro: seperti pertumbuhan sub sektor perdagangan, terkendalinya inflasi, pasar rakyat yang berkondisi baik, penerapan metrologi legal, dan peningkatan ekspor non migas.

2.2 Langkah – langkah Strategis

Untuk tercapainya tujuan pembangunan pada Sektor Industri dan Perdagangan daerah ini, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat menyusun rumusan visi dan misi yang ingin dicapai.

2.2.1 Pernyataan Visi

Dengan berpedoman hal-hal tersebut di atas maka Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat adalah : "Terwujudnya industri dan perdagangan yang tangguh dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat".

Adapun makna dari visi tersebut adalah:

Industri yang tangguh dan : berdaya saing

Mengandung makna bahwa industri di Sumatera Barat bisa bertahan terhadap gejolak ekonomi yang terjadi, baik dari dalam maupun dari luar serta memiliki daya saing untuk bisa mempertahankan diri.

Perdagangan yang tangguh : dan berdaya saing

Mengandung makna bahwa perdagangan di Sumatera Barat diarahkan pada sistem dan distribusi perdagangan yang sehat dan efisien baik kedalam maupun keluar Sumatera Barat bagi pelaku perdagangan dan memberikan perlindungan bagi seluruh konsumen di Sumatera Barat dari gejolak kelangkaan stok utamanya bahan pokok dan strategis sehingga mampu menciptakan perdagangan daerah yang memiliki daya saing dan ketahanan yang tinggi yang pada akhirnya mampu berperan didalam perdagangan regional dan internasional.

Guna mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat : Mengandung makna bahwa perkembangan sektor industri dan perdagangan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat berupa sumbangan PDRB sektor industri dan perdagangan yang tinggi yang mendukung peningkatan perekonomian daerah.

2.2.2 Pernyataan Misi

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan *sense of participation* and *sense of belonging* maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat menyatakan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan industri unggulan daerah dalam rangka mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing dalam menghadapi MEA.

Misi ini diarahkan untuk mengembangkan industri unggulan daerah guna memperkuat daya saing produk industri yang efektif, tangguh, dan efisien baik dari sisi kualitas, desain, harga, kemasan, standarisasi serta kontinuitas produksi dengan menumbuhkan sentra-sentra industri prioritas yang menjadi potensi di daerah kabupaten/kota. Melalui peningkatan daya saing produk industri diharapkan menumbuhkan rasa kecintaan untuk menggunakan produk industri dalam negeri sendiri. Peningkatan pemakaian produk dalam negeri akan meningkatkan daya saing dan berkontribusi bagi pertumbuhan industri di Sumatera Barat. Untuk itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan industri di Sumatera Barat, dibutuhkan kekuatan struktur industri dari hulu sampai hilir serta berorientasi pasar global, sehingga bisa mengambil peranan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

2. Mewujudkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing serta pelindungan konsumen.

Misi ini diarahkan untuk mengembangkan perdagangan khususnya untuk meningkatkan ekspor non migas Sumatera Barat dan penguatan pasar dalam negeri melalui Pemberdayaan terhadap pelaku UMKM (teknis dan permodalan) sehingga produk bisa lebih berkualitas, berproduksi secara kontinyu, memenuhi standar yang ditentukan, merek terdaftar, label halal, kemasan yang lebih baik; Pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal barang (SKA) dari negara mitra FTA, guna melindungi produk dalam negeri; Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan gerakan Aku Cinta Indonesia (ACI), dan pengembangan ekonomi kreatif (Inpres No. 6/2009: Program Ekonomi Kreatif); dan Meningkatkan tindakan pengamanan produk dalam negeri dengan pengawasan terhadap barang beredar.

2.2.3 Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan serta selaras dengan tujuan satu pada misi keempat RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor industri dan perdagangan tahun 2016-2021 yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yaitu:

Misi 1 : Mengembangkan industri unggulan daerah dalam rangka mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing dalam menghadapi MEA.

Tujuan pada misi 1 adalah:

- Meningkatkan peranan sektor industri dalam perekonomian daerah.

Pembangunan di sektor industri ikut memberikan peranan yang besar terhadap pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Kontribusi sektor industri dalam perekonomian merupakan kinerja utama pembangunan di sektor industri dan selaras dengan misi pertama Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yaitu mengembangkan industri unggulan daerah dalam rangka mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing dalam menghadapi MEA. Peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian Sumatera Barat memberikan sumbangan yang berarti pada total PDRB Sumatera Barat. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri perlu adanya peningkatan mutu di industri besar pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah:

- Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan, dengan indikator:
 - a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%);
 - b. Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi standarisasi produk industri (unit usaha);
 - c. Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan;
 - d. Persentase kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas Sumatera Barat (%).
- Misi 2 : Mewujudkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing serta perlindungan terhadap konsumen.

Tujuan pada misi 2 adalah:

- Meningkatkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing.

Perdagangan memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian daerah maupun nasional. Peningkatan usaha perdagangan dalam dan luar negeri akan berdampak terhadap kestabilan pendapatan. Dalam hal ini perlu untuk dilakukan pengembangan perdagangan khususnya untuk meningkatkan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri. Penguatan pasar dalam negeri tidak terlepas dari perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum untuk melindungi hak konsumen. Perlindungan konsumen ini perlu

agar masyarakat terhindar dari bahan-bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi. Perlindungan konsumen diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajiban serta meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan usaha perdagangan barang dan jasa.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai adalah:

- Meningkatnya kinerja perdagangan dalam dan luar negeri negeri, dengan indikator:
 - a. Persentase kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%);
 - b. Persentase omset pasar rakyat (%);
 - c. Peningkatan nilai ekspor (%).
- Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga, dengan indikator, yaitu :
 - a. Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib, label, MKG, distribusi, jasa, sertifikat, registrasi) (%).

2.2.4 Strategi dan Kebijakan

Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi serta misi, dan untuk pemantapkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang industri dan perdagangan.

Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya yang akan menjadi dasar untuk perumusan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi dan kebijakan tersebut berperan penting untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, dan telah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Strategi untuk sektor perindustrian yang dirumuskan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mengembangkan industri unggulan daerah dalam rangka mewujudkan

industri yang tangguh dan berdaya saing dalam menghadapi MEA.

Tujuan 1 : Meningkatkan peranan sektor industri dalam perekonomian daerah.

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan

Strategi:

- 1. Mengembangkan usaha hilirisasi produk industri pengolahan;
- Meningkatkan daya saing produk industri;
- 3. Menjamin ketersediaan bahan baku bagi pengembangan usaha industri kecil

Kebijakan:

- 1. Pengembangan dan peningkatan usaha industri berbasis klaster;
- 2. Pengembangan sentra industri potensial;
- 3. Peningkatan daya saing melalui fasilitasi pengembangan industri kecil menengah agro dan non agro;

Strategi untuk sektor perdagangan yang dirumuskan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Misi 2 : Mewujudkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif

dan berdaya saing serta perlindungan terhadap konsumen.

Tujuan 2 : Meningkatkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif

dan berdaya saing.

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dalam dan luar negeri.

Strategi:

1. Memperkuat pasar dalam negeri;

2. Mengembangkan pasar ekspor komoditi daerah.

Kebijakan:

1. Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan memperkuat jaringan distribusi;

- 2. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- 3. Peningkatan standarisasi dan mutu produk ekspor;
- 4. Peningkatan diversifikasi dan nilai tambah produk ekspor;
- 5. Penguatan kelembagaan dan kerjasama perdagangan regional dan internasional;
- 6. Pengembangan negara tujuan ekspor dan jejaring kerjasama perdagangan luar negeri;
- 7. Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional dan perluasan pasar ekspor non konvensional.

Sasaran 2 : Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga.

Strategi:

1. Peningkatan pengawasan barang dan jasa;

Kebijakan:

1. Peningkatan efektivitas pengawasan perlindungan konsumen;

2.2.5 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 12 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat memiliki susunan organisasi yang terdiri atas 1 orang esselon II, 10 orang esselon III, 22 orang esselon IV dan Fungsional. Berikut jabaran struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Perda dimaksud :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari:

- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub. Bagian Keuangan
- Sub. Bagian Program
- c. Bidang Industri Agro

Bidang ini terdiri dari:

- Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
- Seksi Industri Hasil Laut dan Perikanan

- Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau
- d. Bidang Industri Non Agro

Bidang ini terdiri dari:

- Seksi Industri Kimia Hilir
- Seksi Industri Aneka dan Tekstil
- Seksi Industri Maritim, Elektronika dan Telematika
- e. Bidang Perdagangan Luar Negeri

Bidang ini terdiri dari:

- Seksi Ekspor
- Seksi Impor
- Seksi Bina Usaha Perdagangan Luar Negeri
- f. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Bidang ini terdiri dari:

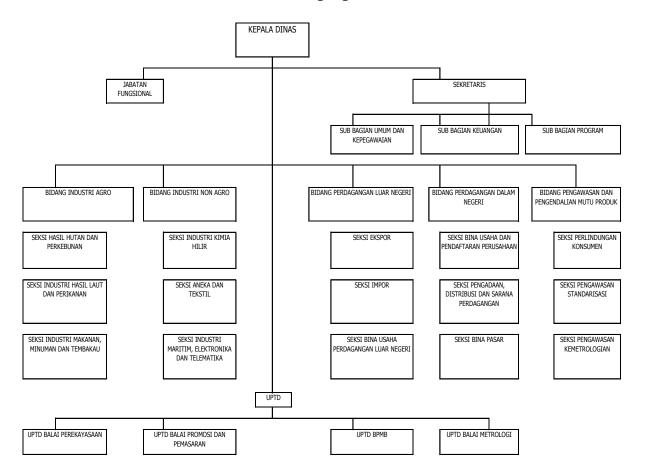
- Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan
- Seksi Pengadaan, Distribusi dan Sarana Perdagangan
- Seksi Bina Pasar
- g. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk

Bidang ini terdiri dari:

- Seksi Perlindungan Konsumen
- Seksi Pengawasan Standarisasi
- Seksi Pengawasan Kemetrologian
- h. Unit Pelaksana Teknis yang terdiri atas 4 UPTD :
 - UPTD Balai Perekayasaan
 - UPTD Balai Metrologi
 - UPTD Balai Promosi dan Pemasaran
 - UPTD BPMB
- i. Kelompok Jabatan Fungsional
 - Fungsional Perencana
 - Fungsional Penyuluh Perindag
 - Fungsional Penera
 - Fungsional Penguji Mutu Barang
 - Fungsional Statistisi

Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat mencakup 10 eselon III, terdiri dari 1 orang Sekretaris Dinas, 5 Kepala Bidang serta 4 Kepala UPTD, seperti pada gambar berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat



BAB III PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TAHUN 2016

Bab ini menguraikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat baik melalui APBD maupun APBN selama tahun anggaran 2016.

Sebagaimana diketahui, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2016 mendapat pagu anggaran APBD sebesar Rp. 35.397.003.208,- untuk membiayai kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan industri dan perdagangan di Sumatera Barat dengan realisasi sebesar Rp. 33.095.250.928,- (93,50%). Berikut terinci pagu dana dan realisasi tahun 2016 dimaksud :

- 1. Belanja Langsung, sebesar Rp. 21.229.179.612,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.378.733.445,- (91,28%). Belanja Langsung terdiri dari :
 - a. Belanja Langsung Pokok, sebesar Rp. 11.033.028.402,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.378.258.845,- (94,07%) yang terdiri atas 5 program dan 30 kegiatan.
 - b. Belanja Langsung Urusan, sebesar Rp. 10.196.151.210,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.000.474.600,- (88,27%) yang terdiri atas 6 program (Sektor Industri 2 program, Sektor Perdagangan 3 program dan 1 program penunjang) dan 51 kegiatan.
- 2. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 14.167.823.596,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.716.517.483,- (96,81%).

Melalui anggaran dekonsentrasi (APBN) Dinas Perindustrian mendapat anggaran sebesar Rp. 7.528.313.000,- yang bersumber dari 4 DIPA untuk membiayai kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan industri dan perdagangan di Sumatera Barat dengan realisasi sebesar Rp. 4.711.167.831- (62,58%). Berikut terinci pagu dana tahun 2016 dimaksud:

- 1. DIPA Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Rp. 973.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 622.052.600,- (63,93%).
- 2. DIPA Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Rp. 2.015.662.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.723.264.300,- (85,49%).
- 3. DIPA Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Rp. 4.199.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.025.199.931,- (48,23%).
- 4. DIPA Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Rp. 340.651.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 341.651.000,- (100%).

Realisasi serapan anggaran (APBD) pada tahun 2016 yang kurang dari 95% terdapat pada 52 kegiatan (dari total 81 kegiatan). Rendahnya serapan anggaran ini di sebabkan karena :

- a. Kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
- b. Rasionalisasi perjalanan dinas keluar daerah.
- c. Efisiensi penginapan (dibayarkan riil cost 30%).
- d. Efisiensi penggunaan anggaran.

Secara terinci, pagu anggaran dan realisasi tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2 laporan ini.

3.1 Bidang Industri Agro

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, dimana Bidang Industri Agro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Industri Hasil Laut dan Perikanan, Industri Makanan, Minuman dan Tembakau.

Bidang Industri Agro terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Seksi Industri Hasil Laut dan Perikanan serta Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau. Berikut kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Bidang Industri Agro pada tahun 2016:

1. Kegiatan Melalui Dana APBD

Alokasi dana APBD Tahun Anggaran 2016 untuk Bidang Industri Agro adalah sebesar Rp. 1.037.507.000,- untuk 10 kegiatan dan telah direalisasikan sebesar Rp. 950.477.862,- (91,61%). Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD adalah :

a. Koordinasi Pengembangan Minyak Atsiri

Koordinasi Pengembangan Minyak Atsiri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 72.479.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 53.592.332,- atau 73,94% dengan fisik kegiatan 100%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan tidak terlaksananya perjalanan dinas luar daerah sebagai akibat dari kebijakan penundaan DAU oleh pemerintah. Output kegiatan adalah terlaksananya forum diskusi dalam rangka pengembangan minyak atsiri Indonesia di Sumatera Barat sebanyak 1 kali. Outcome kegiatan adalah terjalinnya koordinasi yang baik antara stakeholder terkait dalam pengembangan minyak atsiri di Sumatera Barat.

b. Pelatihan Teknis dan Diversifikasi Produk Minyak Atsiri

Pelatihan Teknis dan Diversifikasi Produk Minyak Atsiri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.095.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 63.373.623,- atau 93,07% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pelatihan teknis dan diversifikasi produk minyak atsiri bagi 25 orang IKM pada tanggal 30 Mei s.d 2 Juni 2016 di Hotel City Garden Parai, Sawahlunto. Instruktur pada pelatihan ini adalah Ummi Saidah (Helbyaroma Therapy Gresik, Jawa Timur) dan Djanuardi (Pelaku Usaha Minyak Atsiri Kota Solok). Outcome kegiatan adalah meningkatnya keterampilan IKM dalam meningkatkan mutu minyak atsiri.

c. Pembinaan Kelompok Industri Berbasis Coklat

Pembinaan Kelompok Industri Berbasis Coklat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 72.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 69.874.000,- atau 96,38% dengan fisik kegiatan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pelatihan pengolahan dan diversifikasi coklat bagi 25 IKM pada tanggal 19 s/d 21 April 2016 di Hotel Gran Malindo Bukittinggi dengan narasumber dari Asosiasi Pengusaha Kopi dan Coklat Indonesia (APIKCI) Jakarta. Pada kegiatan ini terdapat sub kegiatan berupa kunjungan ke perusahaan coklat yaitu PT. Ceres yang dilakukan pada tanggal 15 s.d 17 Agustus 2016

yang didampingi oleh Ibu Ester dari APIKCI. Outcome kegiatan adalah berkembangnya keterampilan 25 IKM Makanan berbasis coklat di Sumatera Barat.

d. Pelatihan Teknis dan Pengembangan Disain Kerajinan Kayu dan Bambu

Pelatihan Teknis dan Pengembangan Disain Kerajinan Kayu dan Bambu yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.549.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 94.447.000,- atau 98,85,% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pelatihan teknis dan pengembangan desain kerajinan kayu dan bambu untuk 28 orang IKM pada tanggal 19 s.d 24 September 2016 di Hotel Gran Malindo Bukittinggi dan Workshop Kerajinan Kayu dan Bambu di Kelurahan Manggis. Instruktur pelatihan teknis ini adalah Hendi Hasanudin (Comudity Bambu Bandung) dan Musri (Sanggar Kerajinan Bambu Kabupaten Agam). Outcome kegiatan adalah meningkatnya keterampilan 28 IKM dalam pengembangan desain produk kayu kelapa dan bambu.

e. *Pelatihan Wirausaha Baru di Bidang Industri*

Pelatihan Wirausaha Baru di Bidang Industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 117.580.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 114.394.000,- atau 97,29,% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pelatihan kewirausahaan dalam rangka penumbuhan wirausaha baru di sektor industri untuk 50 orang IKM pada tanggal 9 s.d 11 Agustus 2016 (angkatan 1) dan tanggal 30 Agustus s.d 1 September 2016 (angkatan 2) di Hotel Gran Malindo Bukittinggi. Narasumber pelatihan ini adalah Hasbi SS, Medm (Dosen Politeknik Padang), Lukman L Hakim (Owner Ummi Aufa Hakim Bukittinggi) dan Purnani (Owner Bening Food Jakarta) dengan materi teknik dasar kewirausahaan, kiat wirausaha sukses dan motivasi dalam berusaha. Outcome kegiatan adalah bertambahnya wawasan dan pemahaman 50 orang IKM untuk menciptakan usaha baru.

f. Sosialisasi Penerbitan dan Pemanfaatan Izin Usaha Industri bagi IKM dan Aparat

Sosialisasi Penerbitan dan Pemanfaatan Izin Usaha Industri bagi IKM dan Aparat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 48.516.000,- atau 80,86,% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi penerbitan dan pemanfaatan izin usaha industri bagi IKM dan aparatur untuk 120 orang IKM dan aparatur pada tanggal 31 Mei 2016 di Hotel Pangeran Beach Padang dengan narasumber dari Kementerian Perindustrian RI dan dari Dinas Perindagtamben Kota Padang. Outcome kegiatan adalah bertambahnya pemahaman IKM dan aparatur kab/kota tentang kegunaan dan prosedur pengurusan izin usaha industri.

g. Pembinaan Industri Kecil Menengah Berbasis Hasil Laut dan Perikanan

Pembinaan Industri Kecil Menengah Berbasis Hasil Laut dan Perikanan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 215.278.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 207.044.700,- atau 96,18,% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah :

- Terlaksananya pelatihan diversifikasi produk berbahan baku ikan untuk 50 orang IKM (2 angkatan).

- Terfasilitasinya 35 register MD bagi produk berbahan baku ikan.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya mutu produk IKM berbahan baku ikan di 12 Kab/Kota Sumatera Barat.

h. *Pengembangan Industri Minuman*

Pengembangan Industri Minuman, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 86.075.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 79.697.000,- atau 92,59,% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya temu usaha industri kecil minuman di Sumatera Barat untuk 40 orang IKM pada tanggal 17 s/d 19 Mei 2016 di Hotel Gran Malindo Bukittinggi dengan narasumber dari Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM), Kementerian Perindustrian RI, IKM ACPA dan Dilla Cake Padang. Outcome kegiatan adalah terciptanya mitra kerjasama 40 IKM minuman di Sumatera Barat.

i. Sosialisasi Kemasan, Sertifikat Halal, MD dan SNI bagi IKM

Sosialisasi Kemasan, Sertifikat Halal, MD dan SNI bagi IKM, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.951.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 96.484.100,- atau 96,53,% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah :

- Terlaksananya sosialisasi kemasan, sertifikat halal, MD dan SNI bagi IKM untuk 50 orang pada tanggal 12 s.d 13 April 2016 di Hotel Daima Padang. Narasumber sosialisasi ini adalah Ir. Wiwik Pujiastuti, M.Si dan Suryo Irawan, ST, M.Si (Balai Besar Kimia dan Kemasan Kementerian Perindustrian RI), Drs. Hendri Muchtar, M.Si (Baristand Padang) dan Dra. Hilda Murni, Apt, MM (BPPOM Padang).
- Terlaksananya 10 sertifikasi halal.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemahaman 50 IKM akan pentingnya kualitas produk yang dihasilkan.

j. Penyusunan Naskah Akademik Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah

Penyusunan Naskah Akademik Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 123.055.107,- atau 82,04,% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru dalam rangka Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Provinsi sesuai amanat PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Output kegiatan adalah :

- Terlaksananya penyusunan 1 dokumen naskah akademis Rencana Pengembangan Industri Provinsi Sumatera Barat.
- Terlaksananya FGD Penyusunan Naskah Akademis sebanyak 2 kali, 80 orang.
- Terlaksananya penyusunan 4 buah laporan.

Outcome kegiatan adalah adanya naskah akademis Rencana Pengembangan Industri Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1 dokumen.

2. Kegiatan melalui Dana APBN

Alokasi dana APBN Tahun Anggaran 2016 untuk Bidang Industri Agro adalah sebesar Rp. 169.295.000,- untuk 2 kegiatan. Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN adalah :

1. Kegiatan IKM yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Produk pada Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (PPIKM) Bidang Industri Agro, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pelatihan Diversifikasi Produk Bahan Baku Berbasis Ikan dan Fasilitasi Register

Pelatihan Diversifikasi Produk Bahan Baku Berbasis Ikan dan Fasilitasi Register MD, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.795.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 81.726.250,- atau 99,91% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Hasil kegiatan adalah bertambahnya pengetahuan IKM dalam pengolahan makanan dari hasil laut serta menghasilkan produk yang bermutu dan bernilai jual tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari pada tanggal 16 s/d 20 Mei 2016 di Hotel Plan B Padang yang diikuti oleh 25 orang IKM dengan instruktur Christine Hakim (Pelaku Usaha Rendang Ikan Tuna Padang) dan Hj. Lismarni (Pengusaha Kerupuk Amplang HB, Kab. Agam).

b. Fasilitasi Sertifikasi Halal

Fasilitasi Sertifikasi Halal, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 87.500.000,- atau 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Output kegiatan adalah terfasilitasinya 35 IKM pangan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat untuk mendapatkan sertifikat halal pada tanggal 22 Desember 2016 di Padang. Hasil kegiatan adalah memberikan kepastian halalnya suatu produk pangan yang dihasilkan oleh IKM sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen..

3.2 Bidang Industri Non Agro

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, dimana Bidang Industri Non Agro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Industri Kimia Hilir, Industri Aneka dan Tekstil, Industri Maritim, Elektronika dan Telematika.

Bidang Industri Non Agro terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Industri Kimia Hilir, Seksi Industri Aneka dan Tekstil serta Seksi Industri Maritim, Elektronika dan Telematika. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Bidang Industri Non Agro pada tahun 2016 adalah :

1. Kegiatan melalui Dana APBD

Alokasi dana APBD Tahun Anggaran 2016 untuk Bidang Industri Non Agro adalah sebesar Rp. 1.362.510.000,- untuk 8 kegiatan dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.056.114.600,- (77,51 %). Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD adalah:

a. Pengembangan Tenun Sumatera Barat

Pengembangan Tenun Sumatera Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 240.366.000,-

realisasi anggaran sebesar Rp. 225.458.200,- atau 93,80% dengan fisik kegiatan 100%. Output kegiatan adalah :

- Terlaksananya pelatihan desain tenun untuk 30 orang IKM di 2 sentra.
- Terlaksananya partisipasi pada pagelaran busana/fashion show sebanyak 1 kali.

Outcome kegiatan adalah berkembangnya produk tenun yang dihasilkan pengrajin tenun di 2 sentra Sumatera Barat.

b. Pengembangan Produk Bordir/Sulaman Sumatera Barat

Pengembangan Produk Bordir/Sulaman Sumatera Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 479.582.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 280.126.100,- atau 58,41% dengan fisik kegiatan 85%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan tidak terlaksananya keikutsertaan pada salah satu event fashion show yaitu International Ethnical Fashion (IEF) sebagai akibat dari kebijakan penundaan DAU oleh pemerintah. Output kegiatan adalah:

- Terlaksananya pelatihan desain bordir/sulaman untuk 20 orang IKM.
- Terlaksananya fashion show sebanyak 2 kali, yaitu Indonesia International Islamic Fashion & Product dan Yogya Fashion Week.

Outcome kegiatan adalah berkembangnya desain produk bordir/sulaman yang dihasilkan pengrajin sesuai selera konsumen.

c. Pengembangan Desain Produk dari Kulit

Pengembangan Desain Produk dari Kulit, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.075.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 91.527.200,- atau 97,29% dengan fisik kegiatan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pelatihan dan pengembangan desain produk dari kulit untuk 20 orang IKM pada tanggal 18 s/d 22 April 2016 di Gedung Pusat Desain dan Promosi Kota Padang Panjang dengan narasumber Direktur IKM Kimia, Sandang Aneka dan Kerajinan Direktorat Jenderal IKM Kementerian dan instruktur dari Akademi Teknik Kulit Yogyakarta. Outcome kegiatan adalah berkembangnya desain produk industri kulit Sumbar.

d. Pembinaan Pengelolaan Limbah Cair kepada Pelaku IKM

Pembinaan Pengelolaan Limbah Cair kepada Pelaku IKM, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.062.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 59.583.000,- atau 90,19% dengan realisasi fisik kegiatan 100%. Output kegiatan adalah lancarnya pembinaan limbah cair industri kecil ke 12 Kab/Kota Sumatera Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemahaman pengusaha IKM untuk menjalankan aturan pengelolaan limbah industri guna mengurangi pencemaran lingkungan.

e. Pelatihan Keterampilan Industri Perkapalan Rakyat

Pelatihan Keterampilan Industri Perkapalan Rakyat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 146.311.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 86.862.800,- atau 59,37% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rendah serapan anggaran disebabkan karena tidak terlaksananya kegiatan magang ke industri perkapalan di Jawa Timur dan tidak terealisasinya pembelian bahan praktek untuk kegiatan pendalaman dimaksud. Hal ini

sebagai akibat dari kebijakan penundaan DAU oleh pemerintah. Output kegiatan adalah terlaksananya pelatihan pengembangan industri perkapalan rakyat untuk 20 orang pada tanggal 27 s.d 30 September 2016 di Hotel Grand Zuri Padang. Instruktur pelatihan adalah Sdr. Imam Baihaqi, ST, MT dari Jurusan Teknik Perkapalan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya. Peserta pelatihan berasal dari 6 Kab/Kota Sumatera Barat, yaitu Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman Barat, Kota Padang dan Kota Pariaman. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM dalam membuat kapal rakyat di 6 Kab/Kota Sumatera Barat.

f. Pelatihan Produksi Barang dari Bahan Baku Karet (Compound)

Pelatihan Produksi Barang dari Bahan Baku Karet (Compound), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 158.114.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 141.318.300,- atau 89,38,% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pelatihan produksi barang-barang dari karet (compound) untuk 20 orang IKM pada tanggal 19 s.d 23 September 2016 di Hotel Grand Zuri Padang dengan instruktur pelatihan merupakan pengusaha pengolahan karet di Tangerang, yaitu Haerul, ST dan Asep Lukman Gufron, SE, Akt (Wirausaha). Outcome kegiatan adalah bertambahnya pengetahuan dan keterampilan 20 orang IKM dalam membuat produk dari karet (compound).

g. Pengembangan Industri Kerajinan Batu Permata (Batu Akik)

Pengembangan Industri Kerajinan Batu Permata (Batu Akik), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 56.243.000,- atau 96,97% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pelatihan pengembangan desain batu permata (batu akik) untuk 17 orang IKM pada tanggal 23 s.d 26 Mei 2016 di Hotel Grand Zuri Padang dengan narasumber pimpinan Sentra Batu Mulya EVA GEM Sukabumi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya keterampilan pengrajin batu permata (batu akik) di 6 Kab/Kota Sumatera Barat.

h. Penyebarluasan Informasi HKI dan Bantuan Pendaftaran Merek

Penyebarluasan Informasi HKI dan Bantuan Pendaftaran Merek, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 114.996.000,- atau 95,83% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah :

- Terlaksananya sosialisasi HKI bagi IKM.
- Terlaksananya 50 pendaftaran merk bagi IKM.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya perlindungan merk hasil produksi IKM di 15 Kab/Kota Sumatera Barat.

2. Kegiatan melalui Dana APBN

Alokasi dana APBN Tahun Anggaran 2016 untuk Bidang Industri Non Agro adalah sebesar Rp. 86.383.000,- untuk 1 kegiatan. Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN adalah:

a. Sosialisasi dan Seleksi Calon Penerima Upakarti, Kreasi Prima Mutu Tahun 2016

Sosialisasi dan Seleksi Calon Penerima Upakarti, Kreasi Prima Mutu Tahun 2016, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 86.383.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 85.983.000,- atau 99,53% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi dan seleksi calon penerima Upakarti, Kreasi Prima Mutu Tahun 2016 di 7 Kab/Kota. Hasil kegiatan adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan mengenai Upakarti, Kreasi Prima Mutu serta terpilihnya calon penerima Upakarti dari Sumatera Barat untuk tahun 2016, yang dilaksanakan tanggal 31 Mei 2016 di Padang.

3.3 UPTD Balai Perekayasaan

1. Kegiatan melalui Dana APBD

Alokasi anggaran APBD Tahun 2016 untuk UPTD Balai Perekayasaan adalah sebesar Rp. 1.125.867.500,- untuk membiayai 4 kegiatan dan terealisasi sebesar Rp. 1.006.961.800,- (89,44%). Berikut rincian pelaksanaan kegiatan-kegiatan UPTD Balai Perekayasaan tahun anggaran 2016 :

a. Pelatihan Pembuatan Alsintan

Pelatihan Pembuatan Alsintan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 366.761.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 362.594.500,- atau 98,86% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah :

- Terlaksananya pelatihan pembuatan alsintan bagi 30 orang IKM bengkel (2 angkatan) pada tanggal 21 s.d 25 Juli 2016 (angkatan 1) dan tanggal 4 s.d 8 Agustus 2016 (angkatan2) di Workshop logam UPTD Balai Perekayasaan LMK dan BMB dengan narasumber berasal dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Bengkel Cherry Sarana Agro Payakumbuh dan Bengkel Citra Dragon Padang Pariaman.
- Terlaksananya pengadaan 1 unit mesin las, dimana proses pengadaan dimulai pada Minggu II bulan November 2016 s.d Minggu III bulan Desember 2016.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya keterampilan 30 IKM bengkel dalam membuat alsintan.

b. Pembuatan Prototype Teknologi Tepat Guna Alsintan

Pembuatan Prototype Teknologi Tepat Guna Alsintan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 394.106.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 295.643.100,- atau 75,02,% dengan realisasi fisik sebesar 85%. Output kegiatan adalah:

- Terlaksananya pembuatan 1 set prototype teknologi tepat guna alsintan yang dimulai dari Minggu III bulan Maret s.d Minggu III bulan Oktober 2016 di Workshop logam UPTD Balai Perekayasaan LMK dan BMB. Prototipe yang dibuat adalah alat pencetak mie non gandum yang ditawarkan oleh UPT Bengkel Politani Negeri Payakumbuh. Tahap pelaksanaan terdiri dari pembuatan desain prototipe, pengadaan bahan material dan peralatan pendukung, pelaksanaan pembuatan prototipe dan diakhiri dengan uji coba alat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2016.
- Sosialisasi prototype di 5 Kab/Kota, namun sosialisasi ini tidak dapat terlaksana disebabkan adanya kebijakan penundaan DAU oleh pemerintah.

Outcome kegiatan adalah tersedianya 1 set prototype teknologi tepat guna.

c. Pelatihan Penggunaan Teknologi Tepat Guna bagi IKM

Pelatihan Penggunaan Teknologi Tepat Guna bagi IKM, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 122.480.600,- atau 97,98% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah :

- Terlaksananya pelatihan pengolahan komoditi dengan menggunakan tepat guna untuk 20 orang pada tanggal 11 s.d 15 Mei 2016 di UPTD Balai Perekayasaan dengan narasumber/instruktur berasal dari Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna LIP dan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.
- Terlaksananya identifikasi pengembangan teknologi tepat guna di 18 Kab/Kota Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 27 April 2016.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna bagi IKM dan meningkatnya kemampuan perbengkelan dalam melakukan rekayasa teknologi tepat guna.

d. Pelatihan Teknis Pengelasan Alsintan

Pelatihan Teknis Pengelasan Alsintan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 240.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 226.243.600, atau 94,27, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pelatihan teknis pengelasan alsintan untuk 15 orang IKM pada tanggal 2 s.d 6 September 2016 di UPTD Balai Perekayasaan LMK dan BMB Padang. Sebelum pelatihan ini dilaksanakan, tahap pertama yang dilakukan adalah verifikasi tempat uji kompetensi (TUK) Pelaksana Logam dan Mesin pada Workhop Logam UPTD Balai Perekayasaan LMK dan BMB. Tahap ini merupakan persyaratan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bahwa suatu tempat uji kompetensi harus diverifikasi dan diregistrasi setiap tahunnya. Setelah tahap verifikasi ini berlangsung, dilanjutkan dengan bimbingan teknis terhadap pengelola TUK yaitu seluruh aparat di UPTD Balai Perekayasaan LMK dan BMB. Dalam pelatihan teknis pengelasan alsintan juga dilakukan uji kompetensi pengelasan terhadap peserta pelatihan sehingga nantinya akan memperoleh sertifikat welder. Outcome kegiatan adalah tersedianya SDM pengelasan alsintan.

2. Kegiatan melalui Dana APBN

Alokasi dana APBN Tahun Anggaran 2016 untuk UPTD Balai Perekayasaan adalah sebesar Rp. 98.445.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 98.408.200,- atau 99,96%. Kegiatan melalui dana APBN dimaksud adalah Pelatihan Teknik Pengelasan bagi IKM Bengkel dan Aparat Pembina bagi 5 Kab/Kota. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 29 Juli 2016 di UPTD Balai Perekayasaan LMK dan BMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah peserta 25 orang yang terdiri dari 19 orang IKM Bengkel dan 6 orang aparat pembina. Instruktur pelatihan berasal dari Lembaga Tempat Uji Kompetensi Logam dan Mesin (TUK-LM) Mandiri Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Mesin dan Teknik Industri (P4TK BMTI) Bandung.

3.4 Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, dimana Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Standarisasi dan Pengawasan Kemetrologian.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Perlindungan Konsumen, Seksi Pengawasan Standarisasi dan Seksi Pengawasan Kemetrologian. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk pada tahun 2016 adalah :

1. Kegiatan Melalui Dana APBD

Alokasi dana APBD Tahun Anggaran 2016 untuk Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk adalah sebesar Rp. 624.889.700,-,- untuk 4 kegiatan dan telah direalisasikan sebesar Rp. 531.759.100,- (85,10%). Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD adalah :

a. Pelaksanaan Pengawasan Kemetrologian

Pelaksanaan Pengawasan Kemetrologian, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 151.900.000,, realisasi anggaran sebesar Rp. 121.181.000,- atau 79,78% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pengawasan kemetrologian. Rendahnya serapan anggaran dan fisik disebabkan pengurangan frekuensi perjalanan dinas sebagai akibat dari kebijakan penundaan DAU oleh pemerintah. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemakaian UTTP dalam usaha perdagangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku di 13 Kab/Kota Sumatera Barat.

b. Pengawasan Barang Beredar di Pasaran (SNI Wajib, Label dan barang yang diatur tata niaganya

Pengawasan Barang Beredar di Pasaran (SNI Wajib, Label dan barang yang diatur tata niaganya, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 212.651.600,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 172.232.000,- atau 80,99% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pengawasan barang dan jasa di pasaran (SNI Wajib, Label, MKG, distribusi dan jasa). Rendahnya serapan anggaran disebabkan tidak terlaksananya perjalanan dinas untuk sub kegiatan pengawasan barang yang diatur distribusi dan tata niaganya (bahan berbahaya) sebagai akibat dari kebijakan penundaan DAU oleh pemerintah. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk menjual barang di pasaran sesuai SNI Wajib dan peraturan yang berlaku di 18 Kab/Kota Sumatera Barat.

c. Sosialiasi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Sosialiasi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.648.100,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 80.906.100,- atau 82,01% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi standarisasi dan perlindungan konsumen kepada 200 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemahaman dan wawasan masyarakat serta pelajar tentang pentingnya standarisasi dan perlindungan konsumen di 2 Kab/Kota Sumatera Barat.

d. Pengawasan Mutu Produk Industri

Pengawasan Mutu Produk Industri, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 161.690.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 157.440.000,- atau 97,37% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pengawasan mutu produk industri (garam beryodium dan AMDK) sebanyak 3 kali. Outcome kegiatan adalah meningkatnya penerapan mutu produk industri sesuai standar dan ketentuan yang berlaku di 19 kab/kota Sumatera Barat.

2. Kegiatan Melalui Dana APBN

Alokasi dana APBN Tahun Anggaran 2016 untuk Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk melalui DIPA Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri adalah sebesar Rp. 491.145.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 414.138.400,- (84,32%). Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN adalah:

a. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen

Kegiatan Pemberdayaan Konsumen, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 224.266.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 202.872.800,- atau 90,46% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya kebijakan penundaan DAU oleh pemerintah. Hasil kegiatan adalah meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dari kecurangan perdagangan. Kegiatan ini terdiri atas 4 sub kegiatan, yaitu :

- Sosialisasi Pemberdayaan Konsumen/Konsumen Cerdas, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2016 di Hotel Basko Padang dengan 50 orang peserta yang terdiri dari komunitas konsumen, pemangku kepentingan dan aparatur. Pembicara pada kegiatan ini adalah dari Direktorat Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan RI, BPOM Sumatera Barat, YLKI dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
- Penyelenggaraan Peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas), yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2016 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Bentuk kegiatan Harkonas ini adalah senam, lomba mewarnai dan talkshow.
- Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan dan Perlindungan Konsumen Daerah, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2016 di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan peserta berjumlah 40 orang yang terdiri dari BPSK Kab/Kota, Dinas yang membidangi perdagangan, Bappeda, Biro Perekonomian, DPKD dan instansi terkait.
- Sistem Penerapan Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen dengan bentuk kegiatan adalah penyelesaian terhadap pengaduan kasus konsumen.

b. Sosialisasi Standarisasi Bidang Perdagangan

Sosialisasi Standarisasi Bidang Perdagangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.083.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 58.495.600,- atau 82,29% dengan realisasi

fisik sebesar 100%. Hasil kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi SNI Pasar Rakyat di setiap daerah penerima Dana Dekonsentrasi.

c. Produk yang diawasi di Daerah

Produk yang diawasi di Daerah, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 195.796.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 152.770.000,- atau 78,03% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya kebijakan penundaan DAU oleh pemerintah. Hasil kegiatan adalah melindungi konsumen dari mengkonsumsi barang/jasa yang tidak sesuai dengan standar serta ketentuan lainnya yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan, kesehatan maupun lingkungan (K3L).

3.5 UPTD Balai Metrologi

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan UPTD Balai Metrologi pada tahun 2016 adalah:

1. Kegiatan Melalui Dana APBD

Alokasi dana APBD Tahun Anggaran 2016 untuk UPTD Balai Metrologi adalah sebesar Rp. 884.505.360,- untuk 4 kegiatan dan telah direalisasikan sebesar Rp. 739.269.999,- (83,58%). Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD adalah :

a. Pelaksanaan Tertib Ukur Melalui Tera/Tera Ulang Alat UTTP di Kab/Kota Sumatera Barat

Pelaksanaan Tertib Ukur Melalui Tera/Tera Ulang Alat UTTP di Kab/Kota Sumatera Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 333.631.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 276.271.436,- atau 82,81% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan tidak terlaksananya perjalanan dinas sebagai akibat dari kebijakan penundaan DAU oleh pemerintah. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pelayanan tera/tera ulang alat UTTP oleh 15 regu. Outcome kegiatan adalah terciptanya tertib ukur dan perlindungan produsen serta konsumen dari pemakaian alat-alat UTTP dalam usaha perdagangan.

b. Persiapan Pasar Tertib Ukur di Pasar dan Daerah Tertib Ukur di 2 (dua) Sumatera Barat

Persiapan Pasar Tertib Ukur di Pasar dan Daerah Tertib Ukur di Sumatera Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 130.617.560,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 112.016.463,- atau 85,76% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan tidak terlaksananya sebagian perjalanan dinas sebagai akibat dari kebijakan penundaan DAU oleh pemerintah. Pasar tradisional yang diupayakan untuk dijadikan pasar tertib ukur adalah:

- Pasar Padang Panjang Barat di Kota Padang Panjang
- Pasar Bukittinggi di Kota Bukittinggi
- Pasar Painan di Kabupaten Pesisir Selatan

Kriteria pasar yang dipersiapkan menjadi pasar tertib ukur adalah pasar harus menyediakan ruang untuk tempat pos ukur ulang, pasar dikelola dengan manajemen yang baik dan pemerintah daerah menyanggupi untuk melakukan pembinaan secara berkala dan dijadikan sebagai salah satu program prioritas. Adapun langka-langkah pelaksanaan kegiatan persiapan pembentukan pasar tertib ukur adalah :

- Membentuk tim untuk melakukan pendataan semua UTTP yang digunakan dalam transaksi perdagangan.
- Membentuk tim untuk pelayanan tera ulang terhadap UTTP yang tidak bertanda tera sah
- Membentuk tim reparatir yang akan mereparasi UTTP yang tidak memenuhi persyaratan teknis.
- Membentuk tim yang akan melakukan bimbingan teknis langsung kepada pemilik/pemakai/kuasa UTTP tentang penggunaan UTTP yang benar dan sanksi apabila menggunakan UTTP yang tidak bertanda tera sah.

Output kegiatan adalah terlaksananya persiapan pasar tertib ukur di 3 pasar tradisional Sumatera Barat. Outcome kegiatan adalah terbentuknya 3 pasar tertib ukur di Sumatera Barat

c. Pelaksanaan Verifikasi Alat Standar Laboratorium Kemetrologian

Pelaksanaan Verifikasi Alat Standar Laboratorium Kemetrologian, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.111.600,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 66.617.100,- atau 83,16% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya sisa belanja pemeliharaan, sisa belanja bahan/material dan BBM. Kegiatan verifikasi terdiri dari 3 jenis, yaitu :

- Verifikasi Internal
 - Verifikasi internal dilaksanakan di Laboratorium UPTD Balai Metrologi Padang dan Bukittinggi. Namun untuk verifikasi internal di Padang tidak dapat dilakukan karena beberapa hal berikut :
 - Adanya pindah gedung kantor dan laboratorium UPTD Balai Metrologi ke Komplek Ulu Gadut.
 - Terjadinya proses pengalihan urusan metrologi legal Provinsi ke metrologi legal Kab/Kota per 1 Oktober 2016 (UU RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) sehingga kegiatan kemetrologian yang telah terjadwal hingga bulan Desember harus diselesaikan sampai bulan September 2016.
 - Adanya penambahan kegiatan kemetrologian berupa permintaan bantuan pelayanan sidang tera ulang UTTP dari 5 Kabupaten
 - Padatnya pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah.
- Verifikasi Eksternal
 - Verifikasi eksternal dilaksanakandi Balai SNSU Direktorat Metrolgi.
- Interkomparasi/uji banding/uji profisiensi alat standar.

Output kegiatan adalah terlaksananya verifikasi 4 alat standar dan alat laboratorium kemetrologian yang punya sertifikat dan telusurannya yang dlaksanakan di Padang, Bukittinggi, Jakarta dan Bandung. Outcome kegiatan adalah terpeliharanya ketelusuran, ketelitian dan keakuratan alat-alat standar laboratorium kemetrologian di UPTD Balai Metrologi Padang dan Pos Metrologi Bukittinggi.

d. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 340.145.200,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 284.365.000,- atau 83,60% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Outcome kegiatan adalah terlayaninya tera dan tera ulang terhadap perusahaan-perusahaan yang UTTPnya terpasang dan tidak bisa diangkat ke tempat pelaksanaan tera/tera ulang diseluruh daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Kegiatan Melalui Dana APBN

Alokasi dana APBN Tahun Anggaran 2016 untuk UPTD Balai Metrologi melalui DIPA Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri adalah sebesar Rp. 117.480.000,-. Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN adalah:

a. Pengawasan UTTP dan BDKT

Pengawasan UTTP dan BDKT, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 117.480.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 114.538.900,- atau (97,50%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu Pembentukan Pasar Tertib Ukur, yang bertujuan untuk memberikan jaminan kebenaran kuanta atas barang yang dibeli masyarakat, meningkatkan citra pasar tradisional bagi masyarakat, meningkatkan daya saing pasar dan mendorong pemerintah daerah untuk mengelola pasar tradisional dengan baik dan benar. Lokasi dan nama pasar yang dilakukan pengawasan tera dalam rangka pembentukan pasar tertib ukur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 1 Lokasi dan Hasil Kegiatan Pembentukan Pasar Tertib Ukur Tahun 2016

No.	Nama Kab/Kota	Nama Pasar	Pendataan UTTP (buah)	Tera Ulang UTTP (buah)	Pemilik UTTP (orang)
1	Kab. Agam	Padang Lua	98	79	50
2	Kab. Lima Puluh Kota	Sarilamak	118	28	12
3	Kab. Tanah Datar	Batusangkar	219	233	40
4	Kab. Pesisir Selatan	Batang Kapas	274	27	20
5	Kab. Solok	Alahan Panjang	223	137	57
6	Kab. Pasaman	Benteng dan Kumpulan	179	53	38
7	Kab. Pasaman Barat	Simpang Ampek	96	5	5
8	Kab. Sijunjung	Inpres Muaro	73	46	38
9	Kota Payakumbuh	Ibuh Barat	128	126	68
10	Kota Pariaman	Pariaman	456	215	63
	Jui	1.864	949	391	

Sumber: UPTD Balai Metrologi

3.6 Bidang Perdagangan Luar Negeri

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, dimana Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Ekspor, Impor dan Bina Usaha Perdagangan Luar Negeri.

Bidang Perdagangan Luar Negeri terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Ekspor, Seksi Impor dan Seksi Bina Usaha Perdagangan Luar Negeri. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Bidang Perdagangan Luar Negeri pada tahun 2016 adalah :

1. Kegiatan Melalui Dana APBD

Alokasi dana APBD Tahun Anggaran 2016 untuk Bidang Perdagangan Luar Negeri adalah sebesar Rp. 370.857.000,- untuk 4 kegiatan dan telah direalisasikan sebesar Rp. 291.421.750,- (78,58%). Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD adalah :

a. Pelatihan Prosedur Ekspor dan Impor bagi Aparat Perdagangan dan UKM

Pelatihan Prosedur Ekspor dan Impor bagi Aparat Perdagangan dan UKM, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.437.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 50.864.700,- atau 80,18% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya sisa belanja transpor narasumber dan peserta, sisa honorarium narasumber, sisa belanja akomodasi dan sisa belanja BBM. Output kegiatan adalah terlaksananya pelatihan prosedur ekspor dan impor kepada 50 orang aparat dan UKM pada tanggal 20 s.d 21 September 2016 di Hotel Gran Malindo Bukittinggi. Outcome kegiatan adalah bertambahnya pengetahuan 50 orang Aparat dan UKM calon eksportir atau eksportir tentang prosedur ekspor dan impor.

b. Temu Usaha dan Sosialisasi Pengembangan Produk Komoditi Ekspor

Temu Usaha dan Sosialisasi Pengembangan Produk Komoditi Ekspor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 201.319.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 141.646.050,- atau 70,36% dengan realisasi fisik sebesar 90%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan ada sisa belanja akomodai, honor narasumber dan sisa makan minum rapat. Output kegiatan adalah:

- Terlaksananya pertemuan eksportir dengan instansi terkait di provinsi dan Kab/Kota sebanyak 2 kali. Sub kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan sebanyak 1 kali, yaitu pada tanggal 6 April 2016 di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan narasumber berasal dari Kementerian Perdagangan RI, Kadin, dan PELINDO Sumatera Barat. Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya kebijakan penundaan DAU oleh pemerintah.
- Terlaksananya sosialisasi persyaratan ekspor ke negara tujuan ekspor untuk produk tekstil dan makanan dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang terdiri dari aparat perdagangan dan UKM pada tanggal 27 September 2016 di Gedung AKLI Bukittinggi.
- Terlaksananya temu usaha dalam rangka pengembangan komoditi ekspor Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut :

- Temu usaha komoditi karet dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2016 di Kabupaten Sijunjung, dengan jumlah peserta 30 orang UKM.
- Temu usaha komoditi rempah-rempah dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2016 di Kabupaten Padang Pariaman, dengan jumlah peserta 30 orang UKM.
- Temu usaha komoditi rempah-rempah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2016 di Kabupaten Agam, dengan jumlah peserta 30 orang UKM.
- Terlaksananya sosialisasi peraturan perdagangan luar negeri bagi aparat, UKM, eksportir dan calon eksportir sebanyak 2 kali untuk 50 orang, yaitu pada tanggal 22 Maret 2016 dan 16 November 2016 di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

Outcome kegiatan adalah bertambahnya pengetahuan dan pemahaman 160 orang aparat, UKM calon eksportir dan petani dalam rangka pengembangan komoditi ekspor Sumatera Barat.

c. Sosialisasi Mutu Komoditi Ekspor

Sosialisasi Mutu Komoditi Ekspor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.062.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 44.322.000,- atau 96,22% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi mutu komoditi ekspor kopi dan minyak atsiri yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2016 di Kab. Solok Selatan (komoditi kopi) dan tanggal 17 Mei 2016 di Kota Bukittinggi (komoditi minyak atsiri) dengan jumlah peserta disetiap kegiatan 30 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan UKM dan petani di 2 Kab/Kota tentang peningkatan mutu komoditi kopi dan minyak atsiri.

d. Identifikasi Produk Impor di Sumbar

Identifikasi Produk Impor di Sumbar, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.039.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 54.589.000,- atau 90,92% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya identifikasi produk-produk impor di kab/kota sebanyak 2 kali. Outcome kegiatan adalah teridentifikasinya produk impor yang beredar di 19 Kab/Kota yang dapat dijadikan sebagai data untuk mengambil kebijakan selanjutnya.

2. Kegiatan melalui Dana APBN

Alokasi dana APBN Tahun Anggaran 2016 untuk Bidang Perdagangan Luar Negeri adalah sebesar Rp. 973.000.000,- untuk 5 kegiatan dan telah direalisasikan sebesar Rp. 622.052.600,- (63,93%). Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN adalah :

a. Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah

Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 209.827.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 139.573.300,- atau 66,52% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan tidak terlaksananya sub kegiatan pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah sebagai akibat kebijakan penundaan DAU oleh pemerintah. Hasil kegiatan adalah :

 Terlaksananya koordinasi pengelolaan ekspor dan impor daerah pada tanggal 25 Mei 2016 di Hotel Grand Inna Muara Padang dengan jumlah peserta 50 orang eksportir dan aparat terkait. - Terlaksananya FGD penyelesaian permasalahan ekspor dan impor pada tanggal 22 November 2016 di Hotel Grand Inna Muara Padang dengan jumlah peserta 50 orang eksportir dan aparat terkait.

b. Dokumen/surat terkait ekspor-impor di daerah yang diterbitkan

Dokumen/surat terkait ekspor-impor di daerah yang diterbitkan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.704.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 70.839.900,- atau 88,88% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan pemakaian anggaran sesuai kebutuhan. Hasil kegiatan adalah terlaksananya operasionalisasi penerbitan SKA dan monitoring API secara online.

c. Fasilitasi Promosi dan Diklat kepada UKM

Fasilitasi Promosi dan Diklat kepada UKM, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 294.189.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 232.000.600,- atau 78,86% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Hasil kegiatan adalah :

- Terlaksananya fasilitasi UKM untuk berpartisipasi pada pameran dalam negeri, yaitu :
 - Pameran Interior dan Craft ke 16 (Icraft 2016), dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 18 September 2016 di Jakarta International Convention dengan mengikutsertakan UKM Lansek Manih dan Flora Sulam.
 - Trade Expo Indonesia 2016, dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 16 Oktober 2016 di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta dengan mengikutsertakan UKM CV. Makmur Abadi dan Samara.
 - Pameran Produk Ekspor Daerah/Jogya Trade Expo, dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 31 Oktober 2016 di Jogya Expo Center Yogyakarta dengan mengikutsertakan UKM ASESE dan Sentra Oleh-oleh Khas Minang Ummi Aufa Hakim.
- Terlaksananya keikutsertaan UKM pada diklat ke BPPEI di Jakarta, dengan rincian sebagai berikut :
 - Peserta Diklat UKM ke PPEI Jakarta (CV. Makmur Abadi dan Samara), dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 11 Oktober 2016 dengan materi Tata Cara Display Produk Ekspor dan Prosedur Ekspor.
 - Peserta Diklat UKM ke PPEI Jakarta (Saprigos Yanda dan Meizurni), dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 16 November 2016 dengan materi Manajemen Ekspor Impor plus simulasi.

d. Edukasi Publik mengenai Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Edukasi Publik mengenai Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 164.316.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 11.508.000,- atau 7% dengan realisasi fisik sebesar 15%. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan khususnya pelaku UKM dalam menciptakan opini publik yang positif dalam memasuki pasar bebas MEA dan menstimulasi peran aktif pemerintah daerah serta kalangan dunia usaha untuk turut serta mengelola kesempatan atau tantangan MEA. Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya kebijakan penundaan DAU oleh pemerintah sebesar Rp. 151.352.000,-, sehingga pelaksanaan edukasi publik mengenai implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak dilaksanakan.

e. Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 224.964.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 168.131.800,- atau 74,74% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan pemakaian anggaran sesuai kebutuhan. Hasil kegiatan adalah lancarnya pelaksanaan Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah pada Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, melalui penyediaan layanan perkantoran selama 12 bulan.

3.7 UPTD Balai Pengawasan Mutu Barang (BPMB)

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan UPTD Balai Pengujian Mutu Barang pada tahun 2016 adalah :

1. Kegiatan Melalui Dana APBD

Alokasi dana APBD Tahun Anggaran 2016 untuk UPTD BPMB adalah sebesar Rp. 661.000.000,untuk 5 kegiatan dan telah direalisasikan sebesar Rp. 567.875.124,- (85,91%). Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD adalah :

a. Pengujian Mutu Barang Ekspor

Pengujian Mutu Barang Ekspor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 374.927.500,- atau 93,73% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah tersedianya 4 jenis bahan kimia dan 2 alat laboratorium untuk laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi. Outcome kegiatan adalah lancarnya penerbitan 1700 sertifikat mutu.

b. Reakreditasi Laboratorium UPTD BPMB

Reakreditasi Laboratorium UPTD BPMB, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 86.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 67.758.225,- atau 78,79% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya reakreditasi/survelien di 2 laboratorium untuk 9 jenis alat. Outcome kegiatan adalah laboratorium penguji dan kalibrasi diperpanjang akreditasinya.

c. Pengawasan Mutu Komoditi

Pengawasan Mutu Komoditi, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.292.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 66.316.699,- atau 97,11% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pengawasan mutu 7 komoditi yang diekspor di 12 Kab/Kota Sumatera Barat dengan tahap pengambilan contoh komoditi untuk selanjutnya diuji di laboratorium. Outcome kegiatan adalah tersedianya hasil mutu komoditi yang diawasi.

d. Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Komoditi Ekspor

Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Komoditi Ekspor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.142.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 27.947.700,- atau 38,21% dengan realisasi fisik sebesar 50%. Output kegiatan adalah terlaksananya bimbingan teknis standarisasi dan mutu komoditi kakao untuk 80 orang di 2 Kab/Kota. Outcome kegiatan adalah bertambahnya pengetahuan 80 orang petani, pedagang dan aparat tentang SNI. Rendahnya serapan anggaran dan fisik kegiatan disebabkan pelaksanaan bimbingan teknis hanya 1 kali untuk 26 orang peserta. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kebijakan penundaan DAU oleh pemerintah.

e. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.565.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 30.925.000,- atau 92,13% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kalibrasi peralatan laboratorium pada pelanggan/konsumen. Kegiatan ini terdiri dari pelayanan kalibrasi peralatan laboratorium ke kab/kota dan pelayanan kalibrasi peralatan laboratorium ibukota propinsi.

3.8 Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, dimana Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Pengadaan Distribusi dan Sarana Perdagangan serta Bina Pasar.

Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Seksi Pengadaan Distribusi dan Sarana Perdagangan serta Seksi Bina Pasar. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada tahun 2016 adalah :

1. Kegiatan melalui Dana APBD

Alokasi dana APBD Tahun Anggaran 2016 untuk Bidang Perdagangan Dalam Negeri adalah sebesar Rp. 521.152.050,- untuk 7 kegiatan dan telah direalisasikan sebesar Rp. 430.961.400,- (82,69%). Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD adalah :

a. Penyusunan Data Pasar Tradisional di Sumatera Barat

Penyusunan Data Pasar Tradisional di Sumatera Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.512.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 54.102.000,- atau 73,60% dengan realisasi fisik sebesar 75%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya sisa pencetakan buku data pasar. Output kegiatan adalah terlaksananya penyusunan buku data pasar tradisional di Sumatera Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya data pasar tradisional 5 kab/kota Sumatera Barat (Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung dan Kab. Solok Selatan).

b. Monitoring dan Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi

Monitoring dan Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.103.050,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 17.437.800,- atau 45,76% dengan realisasi fisik sebesar 70%. Output kegiatan adalah terlaksananya monitoring distribusi pupuk bersubsidi ditingkat distributor di 17 Kab/Kota sebanyak 2 kali. Rendahnya serapan anggaran disebabkan tidak terlaksananya 1 kali monev ke 17 Kab/Kota sebagai akibat dari kebijakan penundaan DAU oleh pemerintah. Dari monitoring diperoleh informasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagai berikut :

- Urea sebesar 66.848,41 ton atau 94,82 % dari alokasi 70.500 ton
- Za sebesar 13.003 ton atau 92,88% dari alokasi 14.000 ton
- SP-36 sebesar 26.340 ton atau 97,56% dari alokasi 27.000 ton
- NPK sebesar 57.748 ton atau 97,88% dari alokasi 59.000 ton
- Organik sebesar 11.807,60 ton atau 78,72% dari alokasi 15.000 ton.

Outcome kegiatan adalah lancarnya distribusi pupuk bersubsidi di 17 kab/kota sesuai dengan aturan yang berlaku (tepat jumlah, kualitas, waktu, lokasi, jenis dan harga).

c. Bimbingan Teknis dan Pengawasan Teknis kepada Aparat tentang SIUP dan TDP Kabupaten/Kota Sumatera Barat

Bimbingan Teknis dan Pengawasan Teknis kepada Aparat tentang SIUP dan TDP Kabupaten/Kota Sumatera Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.992.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 69.369.200,- atau 77,08% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya bimbingan teknis pada 127 orang aparatur/petugas teknis penerbitan SIUP dan TDP pad tanggal 1 s.d 2 Maret 2016 dan terlaksananya pengawasan ke tempat pelayanan SIUP/TDP di 19 kab/kota. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur yang menangani SIUP dan TDP di 19 Kab/Kota sehingga bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelaku usaha.

d. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.185.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 80.146.000,- atau 96,35% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang pada tanggal 19 April 2016 di Padang. Sub kegiatan lainnya adalah *talk show* yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2016 dan iklan layanan masyarakat di Padang TV selama 100 hari. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan produksi dalam negeri.

e. Penyelenggaraan Pasar Murah

Penyelenggaraan Pasar Murah, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.083.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 63.083.000,- atau 96,93% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pasar murah bagi masyarakat di 2 lokasi, yaitu Kecamatan Pauh (20 s.d 21 Juni 2016 di Kelurahan Pisang) dan Kecamatan

Koto Tangah (22 s.d 23 Juni 2016 di Kelurahan Balai Gadang). Outcome kegiatan adalah tersedianya bahan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau.

d. Pengembangan Pasar Komoditi Lokal melalui Pasar Lelang Luar Provinsi

Pengembangan Pasar Komoditi Lokal melalui Pasar Lelang Luar Provinsi, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.922.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 79.368.400,- atau 79,43% dengan realisasi fisik sebesar 85%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi pengembangan komoditi lokal melalui pasar lelang sebanyak 5 kali. Namun pasar lelang ini tidak sepenuhnya dapat dilakukan karena adanya kebijakan penundaan DAU oleh pemerintah. Hal inilah penyebab rendahnya serapan anggaran dan fisik kegiatan. Berikut rincian pelaksanaan pasar lelang luar provinsi :

- Pasar Lelang Jambi, dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu :
 - Tanggal 12 Maret 2016 bertempat di Restoran Bumi Pasundan Jambi. Kegiatan ini membawa 4 orang UKM yang berasal dari Kota Padang Panjang, Kab. Solok, Kab. Pasaman dan Kota Padang dengan komoditi hasil perkebunan.
 - Tanggal 27 Juli 2016 di Restotan Bumi Pasundan Jambi. Kegiatan ini membawa 4 orang UKM yang berasal dari Kab. Sijunjung, Bukittinggi dan Kota Padang dengan komoditi hasil perkebunan olahan.
- Pasar Lelang Riau, dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2016 di Hotel Jatra Pekanbaru dengan membawa 4 orang UKM yang berasal dari Kota Padang, Kab. Padang Pariaman dan Kab. Pesisir Selatan dengan komoditi hasi perkebunan olahan dan makanan ringan.
- Pasar Lelang Lampung, dilaksanakan pada tanggal 11 November 2016 dengan membawa 5 orang UKM yang berasal dari Kota Padang, Kab. Padang Pariaman dan Kab. Pasaman dengan komoditi perkebunan olahan.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya peluang dan daya serap pasar komoditi Sumatera Barat.

e. Pelaksanaan Pasar Lelang Forward di Sumatera Barat

Pelaksanaan Pasar Lelang Forward di Sumatera Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.355.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 67.455.000,- atau 94,53% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya 3 kali pasar lelang komoditi daerah Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan pasar lelang tanggal 16 Februari 2016 dengan jumlah transaksi lelang sebesar Rp. 3.280.110.000,- dengan komoditi perkebunan.
- Kegiatan pasar lelang tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah transaksi lelang sebesar Rp. 1.373.660.000,- dengan komoditi perkebunan.
- Kegiatan pasar lelang tanggal 9 Agustus 2016 dengan jumlah transaksi lelang sebesar Rp. 1.519.800.000,- dengan komoditi beras.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya peluang dan daya saing pasar komoditi lokal Sumatera Barat.

2. Kegiatan melalui Dana APBN

Alokasi dana APBN Tahun Anggaran 2016 untuk Bidang Perdagangan Dalam Negeri adalah sebesar Rp. 1.379.093.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.176.322.500,- (85,29%). Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN adalah:

a. Kegiatan Pasar Murah

Kegiatan Pasar Murah, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Hasil kegiatan adalah tersedianya barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada saat Lebaran Idul Fitri Tahun 2016. Pasar Murah dilaksanakan di 4 lokasi di Kota Padang, yaitu:

- Kecamatan Kuranji dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016
- Kecamatan Lubuk Begalung dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2016
- Kecamatan Koto Tangah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2016
- Kecamatan Padang Selatan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016

Pasar murah ini menjual kebutuhan pokok, seperti telur ayam, minyak goreng, gula pasir, mie instan, susu, tepung terigu, barang kebutuhan harian, makanan ringan dan kue lebaran. Peserta Pasar Murah adalah PT. Incasi Raya (minyak goreng Sari Murni), PT. Indofood (divisi Tepung Bogasari), PT. Indomarco (divisi Indomie, susu Indomilk), Padang Distribusi Raya (kebutuhan harian), PT. PPI (gula pasir) dan pedagang besar telur.

b. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa

Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 127.897.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 57.821.500,- atau 45,21% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya kebijakan penundaan DAU oleh pemerintah dan terjadinya pengalihan lokasi kegiatan pameran dari Tegal menjadi Yogyakarta. Hasil kegiatan adalah dapat dipromosikannya produk-produk unggulan Sumatera Barat dalam rangka memperluas jaringan pemasaran produk Sumatera Barat melalui pameran :

- Pameran Nusa ke 11 di Yogyakarta tanggal 6 s.d 9 Oktober 2016 dengan mengikutsertakan 3 UKM Makanan, yaitu UKM Arai Pinang Bunda (Kab. Pesisir Selatan), UKM Rendang Erika (Kota Payakumbuh) dan UKM Khamira (Kota Solok).
- Pameran Produk Dalam Negeri Regional III di Yogyakarta dengan mengikutsertakan 2
 UKM Non Makanan, yaitu UKM Aida Sulaman Bordir (Kab. Agam) dan UKM Sulaman Melati Ungu (Kota Pariaman).

c. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri

Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 355.061.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 331.226.000,- atau 93,29% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Hasil kegiatan adalah termonitoringnya perkembangan harga bahan pokok dan barang strategis guna menjaga stabilisasi harga.

d. Produk Unggulan yang difasilitasi Pemasarannya

Produk Unggulan yang difasilitasi Pemasarannya, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 34.724.400,- atau 42,35% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya kebijakan penundaan DAU oleh pemerintah. Hasil kegiatan adalah dikenalnya produk-produk UKM Sumatera Barat dan diharapkan terjadinya kontak dan kontrak dagang dengan pembeli/calon pembeli baik dari dalam maupun luar negeri melalui forum dagang/misi dagang di Yogyakarta tanggal 6 s.d 7 Oktober 2016 dengan jumlah peserta 5 pelaku usaha yang berasal dari Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar dan Kota Padang.

e. Kegiatan Pelaksanaan Pasar Lelang di Daerah

Kegiatan Pelaksanaan Pasar Lelang di Daerah, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 456.340.800,- atau 91,27% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya moratorium launching revitalisasi pasar lelang oleh Bappebti sehingga kegiatan launching tidak dilaksanakan. Output kegiatan adalah:

- Terlaksananya pasar lelang forward sebanyak 9 kali dengan jumlah peserta 100 orang disetiap lelang.
- Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Pasar Lelang dan SRG sebanyak 4 kali, dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 23 Maret 2016 di Gudang SRG Kabupaten Solok
 - Tanggal 26 April 2016 di Gudang SRG Kabupaten Pasaman Barat
 - Tanggal 28 Juli 2016 di Gudang SRG Kabupaten Lima Puluh Kota
 - Tanggal 3 November 2016 di Gudang SRG Kabupaten Tanah Datar
- Terlaksananya monitoring transaksi pasar lelang sebanyak 1 kali.

f. Layanan Internal

Layanan Internal, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 214.135.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 196.209.800,- atau 91,63% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Hasil kegiatan adalah lancarnya pelaksanaan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri pada Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, melalui penyediaan layanan manajemen PDN selama 12 bulan.

3.9 UPTD Balai Promosi dan Pemasaran

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan UPTD Balai Promosi dan Pemasaran pada tahun 2016 adalah :

1. Kegiatan Melalui Dana APBD

Alokasi dana APBD Tahun Anggaran 2016 untuk UPTD Balai Promosi dan Pemasaran adalah sebesar Rp.3.607.862.600,- untuk 6 kegiatan dan telah direalisasikan sebesar Rp. 3.425.632.965,- (94,95%). Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD adalah :

a. Pembinaan dan Pengembangan Produk Kerajinan Sumatera Barat

Pembinaan dan Pengembangan Produk Kerajinan Sumatera Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 535.080.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 501.280.461,- atau 93,68,% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah:

- Terlaksananya pengembangan desain batik Minang sebanyak 1 kali pada tanggal 21 s.d 28 November 2016 di Hotel Grand Zuri dan dilanjutkan dengan kegiatan Achievement Motivation Training (AMT) pada tanggal 30 November s.d 4 Desember 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang IKM Batik.
- Terlaksananya keikutsertaan pada pameran luar Sumbar, yaitu :
 - Pameran dalam rangka HUT Dekranas ke 36 yang dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 20 Mei 2016 di gedung SMESCO Jakarta.
 - Pameran Crafina 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 30 Oktober 2016 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta.
- Terlaksananya Rakor Pembina kerajinan sebanyak 1 kali pada tanggal 22 Agustus 2016 di Auditorium Gubernur Padang.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya peranan lembaga pembina kerajinan terhadap pengembangan produk lokal kerajinan di pasar global.

b. Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk IKM Sumbar

Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk IKM Sumbar, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.731.400,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 69.373.544,- atau 99,49% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah:

- Terlaksananya pembuatan 210 booklet produk IKM.
- Terlaksananya bimbingan teknis penggunaan website bagi 25 orang IKM pada tanggal 1 s.d 3 Maret 2016 di Hotel Pangeran City Padang, dengan 2 narasumber berasal dari Universitas Andalas dan 1 orang narasumber dari Dinas Perindag Prov. Sumbar.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya promosi dan pemasaran produk IKM Sumbar.

c. Temu Usaha Pengembangan Pasar Bagi Industri Kecil

Temu Usaha Pengembangan Pasar Bagi Industri Kecil, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 124.194.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 119.695.500,- atau 96,38% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi pertemuan pemasaran antara IKM dengan stakeholder terkait dalam meningkatkan pemasaran. Temu usaha dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu :

- Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 24 Mei 2016 di Hotel Pangeran City Padang. Temu usaha angkatan I mengikutsertakan 60 orang IKM yang berasal dari 18 Kab/Kota Sumatera Barat dengan narasumber Lukman El Hakim (pemilik outlet Ummi Aufa Hakim Bukittinggi), Christine Hakim (pemilik outlet Christine Hakim Padang) dan Roy N Mandey (Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia/APRINDO Jakarta).
- Angkatan II dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2016 di Dinas Perindag Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Temu usaha ini dihadiri oleh stakeholder tekait, pelaku usaha dari Surabaya dan 7 pelaku usaha dari Sumatera Barat dengan narasumber Ir. Kristiawan (pengusaha keripik buah) dan Dra. Trusti Henartiwi, M.Si (pengusaha kerajinan tekstil/sulaman).

Outcome kegiatan adalah terciptanya peluang pasar produk-produk IKM.

d. Peningkatan Promosi IKM di Sumatera Barat

Peningkatan Promosi IKM di Sumatera Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.531.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 77.361.000,- atau 98,51% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya keikutsertaan IKM pada 3 pameran lokal di Sumatera Barat, yaitu :

- Pameran Nasional Padang Fair, yang dilaksanakan tanggal 29 April s.d 8 Mei 2016 bertempat di GOR H. Agus Salim Padang dengan mengikutsertakan 2 IKM, yaitu IKM Er Bordir (Kota Padang) dan IKM Baby Set (Kab. Agam).
- Bazar Ramadhan Perindag yang dilaksanakan tanggal 14 s.d 17 Juni 2016 di Lapangan Parkir Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan mengikutsertakan 60 pelaku usaha binaan Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Barat, binaan Dinas Pertanian dan Peternakan serta distributor sembako dan Bulog.
- Bazar di lapangan parkir kantor Gubernur Sumatera Barat dilaksanakan tanggal 28
 Juni s.d 1 Juli 2016 dengan mengikutsertakan 34 orang IKM yang terdiri dari 17 IKM
 Tekstil dan 17 IKM Makanan.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengenalan dan informasi terhadap produkproduk IKM kepada masyarakat lokal.

e. Peningkatan Promosi IKM di Luar Sumatera Barat

Peningkatan Promosi IKM di Luar Sumatera Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 762.173.700,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 630.533.600,- atau 82,73% dengan realisasi fisik sebesar 91%. Output kegiatan adalah terlaksananya keikutsertaan IKM pada 10 pameran di Luar Sumatera Barat, yaitu:

- Pameran Batam CTI (Craft Tourism and Investment) yang dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 20 Maret 2016 di pusat perbelanjaan Nagoya Hill Kota Batam, Kepulauan Riau. IKM yang diikutsertakan dari Dinas Perindustrian dan Perdangangan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 IKM (IKM Makanan Bundo Fabio dari Kota Padang dan IKM Desi Bordir dari Kota Padang).
- Pameran Pekan Raya Sumatera Utara 2016 yang dilaksanakan tanggal 18 Maret s.d 18
 April 2016 bertempat di Jalan Gatot Subroto No. 238 Medan Sumatera Utara. IKM
 yang diikutsertakan dari Dinas Perindustrian dan Perdangangan Provinsi Sumatera
 Barat sebanyak 2 IKM (IKM Sulaman Rani dari Kab. Agam dan IKM Rendang Erika
 dari Kab. Lima Puluh Kota).
- Pameran Lombok Sumbawa Expo yang dilaksanakan tanggal 27 April s.d 1 Mei 2016 bertempat di Hall Lombok Epicentrum Mall Mataram. IKM yang diikutsertakan dari Dinas Perindustrian dan Perdangangan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 IKM (IKM Tenun Songket Jembatan Merah dari Kota Sawahlunto dan IKM Aneka Makanan Zet & Chici dari Kota Padang).
- Pameran Indonesia Agro Expo 2016 yang dilaksanakan tanggal 5 s.d 8 Mei 2016 bertempat di Jakarta International Expo (JIEXPO) Jakarta. IKM yang diikutsertakan dari Dinas Perindustrian dan Perdangangan Provinsi Sumatera Barat 2 IKM (IKM Keripik Balado Mahkota dari Kota Padang dan IKM Rendang Asese dari Kota Padang).

- Pameran Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI dan Banda Aceh Expo 2016) dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 11 Mei 2016 bertempat di Lapangan Blang Padang Banda Aceh. IKM yang diikutsertakan dari Dinas Perindustrian dan Perdangangan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 IKM (IKM Rini Sulaman dari Kabupaten Lima Puluh Kota dan IKM Makanan Badasso dari Kabupaten Solok).
- Pameran Gebyar Kriya Wisata Nusantara Expo 2016 dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 4 Juni 2016 bertempat di Festival City Link Mall Kota Bandung. IKM yang diikutsertakan dari Dinas Perindustrian dan Perdangangan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 IKM (IKM Rematha Songket dari Kab. Lima Puluh Kota dan IKM Kasih Ibu dari Kota Padang).
- Pameran Produk Kerajinan Unggulan Nusantara ke 16 (ICRA) dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 18 September 2016 bertempat di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta. IKM yang diikutsertakan dari Dinas Perindustrian dan Perdangangan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 IKM (IKM Sulaman Bayang Kagasa dari Kab. Pesisir Selatan dan IKM Rematha dari Kab. Lima Puluh Kota).
- Pameran Kalbar Expo 2016 dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 14 Agustus 2016 bertempat di Pontianak Convention Center, Kalimantan Barat. IKM yang diikutsertakan dari Dinas Perindustrian dan Perdangangan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 IKM (IKM Rendang Mizaki dari Kota Padang Panjang dan IKM Sulaman Bordir Rika Embroidery dari Kota Payakumbuh).
- Pameran Indonesia Fashion & Craft 2016 dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 25 September 2016 bertempat di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta. IKM yang diikutsertakan dari Dinas Perindustrian dan Perdangangan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 IKM (IKM Tenun Yunarti Art dari Kota Padang dan IKM Sulaman Eva dari Kab. Agam).
- Sumatera Barat Expo 2016 dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 27 November 2016 bertempat di Jl. Soekarno, Braga Bandung. IKM yang diikutsertakan dari Dinas Perindustrian dan Perdangangan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4 IKM (IKM Rangkiang Bambu dari Kab. Agam, IKM Sri Tirta dari Kab. Pesisir Selatan, IKM Mutiara Indah dari Kota Bukittinggi dan IKM Songket Yunarti Art dari Kota Padang).

Rendahnya serapan anggaran dan fisik disebabkan tidak terlaksananya 1 kegiatan pameran disebabkan kebijakan penundaan DAU oleh pemerintah. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengenalan dan informasi terhadap produk-produk IKM daerah Sumatera Barat ditingkat nasional dan internasional.

f. Pelaksanaan Icon Inacraft ke 18

Pelaksanaan Icon Inacraft ke 18, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.038.152.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.027.388.860,- atau 99,47% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah :

- Terlaksananya pembuatan 7 buah gerbang utama
- Terlaksananya pembuatan 270 stel pakaian seragam
- Terlaksananya sewa backdrop
- Cetak 1.500 booklet
- Cetak majalah sebanyak 2 kali

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 24 April 2016 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta dengan mengikutsertakan 4 IKM yaitu IKM Cici Silver, IKM Suryani Bordir, IKM Kagasa dan IKM Fazli Anyaman. Outcome kegiatan adalah terlaksananya Sumatera Barat sebagai ikon Inacraft ke 18 tahun 2016.

2. Kegiatan Melalui Dana APBN

Alokasi dana APBN Tahun Anggaran 2016 untuk UPTD Balai Promosi dan Pemasaran melalui DIPA PPIKM adalah sebesar Rp. 524.675.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 161.342.700,- (30,75%). Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN adalah :

a. IKM yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran

IKM yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 524.675.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 161.342.700,- atau 30,75% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan adanya kebijakan penundaan DAU oleh pemerintah. Pameran yang diikuti adalah :

- Pameran Inacraft ke 18 Tahun 2016, dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 24 April 2016 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, dengan mengikutsertakan 2 IKM (IKM Citra Monalisa dan IKM Bukit Centong) dan 3 orang aparat pendamping.
- Pameran Indonesia Fashion Accessories & Craft, dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 29 Mei 2016 di Makasar dengan mengikutsertakan 2 IKM (IKM Kagasa dan IKM Putri Ulakan) dan 3 orang aparat pendamping.

3.10 Sekretariat

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, dimana Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) sub bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 adalah :

3.10.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, urusan rumah tangga, perlengkapan dan protokol, serta kepegawaian adalah :

- 1. Mengendalikan surat masuk dan mendistribusikan kepada Sekretariat, Kasubag dan UPTD dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
- 2. Mengendalikan arsip dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
- 3. Melaksanakan pengusulan gaji berkala, kenaikan pangkat dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

- 4. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberiaan penghargaan serta tugas/izin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungisonal.
- 5. Melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, seperti :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
 - k. Jasa Sopir Kantor
 - I. Jasa Pengamanan Kantor
 - m. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
 - n. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
 - o. Pembangunan Gedung Kantor
 - p. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - q. Pengadaan Meubiler
 - r. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
 - s. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - t. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - u. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
 - v. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD
 - w. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
 - x. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat masih mengalami kekurangan sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran operasional kerja kantor. Terutama ketersediaan gedung kantor yang tidak kondusif serta kurangnya kendaraan roda 4 dalam membantu kelancaran pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha ke lapangan. Kondisi Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Golongan Tanah, sebesar Rp. 32.724.331.800,-,- yang terdiri atas :

- Golongan Tanah Rp. 32.724.331.800,-

2. Golongan Peralatan dan Mesin, sebesar Rp. 13.306.668.852,- yang terdiri atas:

-	Alat-alat Besar	Rp.	671.913.587,-
-	Alat-alat Angkutan	Rp.	2.145.248.700,-
-	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp.	4.308.629.265,-
-	Alat Pertanian	Rp.	943.094.610,-
-	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp.	3.253.537.950,-
-	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp.	152.403.150,-
-	Alat-alat Kedoteran	Rp.	287.035.000,-
-	Alat Laboratorium	Rp.	1.544.686.590,-
-	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	Rp.	120.000,-

- 3. Golongan Gedung dan Bangunan, sebesar Rp. 28.091.994.221,- yang terdiri atas :
 - Bangunan Gedung

Rp. 28.091.994.221,-

- 4. Golongan Aset Tetap Lainnya, sebesar Rp. 502.550.000,- yang terdiri atas :
 - Barang Bercorak Kebudayaan

Rp. 502.550.000,-

Sementara itu, aset yang tidak digunakan kondisi tahun 2016 adalah sebesar Rp. 434.513.000,-yang terdiri atas 2 (dua) komponen, yaitu :

- 1. Aset tidak bermanfaat, dengan nilai sebesar Rp. 175.000.000,-
- 2. Aset dipakai pihak lain/hibah, dengan nilai sebesar Rp. 259.513.000,-

Kekuatan personil yang tersedia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat keadaan 31 Desember 2016 berjumlah 156 orang yang terdiri dari :

- Golongan IV : 29 orang - Golongan III : 101 orang - Golongan II : 26 orang

Jika dilihat dari kualifikasi pendidikan terakhir terdiri dari :

 - Tamatan S2
 :
 20 orang

 - Tamatan S1
 :
 53 orang

 - Tamatan D. III
 :
 10 orang

 - Tamatan SLTA
 :
 73 orang

 - Tamatan SLTP
 :
 0 orang

 - Tamatan SD
 :
 0 orang

Dari 156 orang terbagi dalam jabatan Struktural dan Fungsional:

- 1. Jabatan Struktural sebanyak 27 orang
- 2. Jabatan Fungsional Umum sebanyak 97 orang
- 3. Jabatan Fungsional sebanyak 32 orang

Untuk lebih jelas, rincian kekuatan personil di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada lampiran 5.

3.10.2 Sub Bagian Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 adalah:

- 1. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan dinas khususnya APBD.
- 2. Menyelenggarakan pembukuan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menyusun laporan keuangan secara berkala.
- 4. Merekap laporan realisasi penerimaan retribusi pendapatan daerah UPTD dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dan menyampaikannya ke Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat (rekap pendapatan tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran 6).

Potret pelaksanaan kinerja keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 dapat dilihat pada rincian berikut :

1. Belanja Daerah untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 berjumlah Rp. 35.397.003.208,- direncanakan untuk membiayai :

Belanja Pegawai
 Belanja Barang dan Jasa
 Rp. 14.167.823.596, Rp. 12.995.534.600,-

- Belanja Modal Rp. 8.233.645.012,-

2. Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2016 sebesar Rp. 33.095.250.928,- (93,50%) yang diuraikan sebagai berikut :

Belanja Pegawai
 Belanja Barang dan Jasa
 Belanja Modal
 Rp. 13.716.517.483, Rp. 11.245.382.745, Rp. 8.133.350.700,-

3. Dari belanja pegawai yang dianggarkan sebesar Rp. 14.167.823.596,- terealisasi sebesar Rp. 13.716.517.483,- (96,81%).

3.10.3 Sub Bagian Program

Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 adalah:

- 1. Menyusun program kerja Sub Bagian Program.
- 2. Melaksanakan Koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang serta UPTD yang ada dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
- 3. Membuat bahan Renja, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas Prindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
- 4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- 5. Menghimpun data pembangunan sektor industri dan perdagangan
- 6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV DATA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN TAHUN 2016

Bab ini menguraikan data hasil kinerja Sektor Industri dan Sektor Perdagangan selama tahun anggaran 2016. Data-data tersebut meliputi data kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB, data perkembangan industri, data IKM yang difasilitasi sertifikasi produk industri, data perkembangan ekspor, data perkembangan impor, data kegiatan lelang, data penerbitan SIUP dan TDP, data penerbitan sertifikat mutu, data UTTP dan prestasi kinerja kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016.

4.1 Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan dalam PDRB

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2016 adalah sebesar 10,11 persen. Kontribusi tersebut menurun sebesar 0,14 persen bila dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 10,25 persen. Apabila dilihat selama periode 2012-2016 menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Sedangkan pada sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 kontribusi sektor ini terhadap PDRB sebesar 14,90 persen, meningkat sebesar 0,22 persen bila dibandingkan dengan tahun 2015. Kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB pada tahun 2012-2016 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Struktur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016

No.	Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Α	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25.02	24.67	25.04	24.84	24.06
2	В	Pertambangan dan Penggalian	4.44	4.60	4.86	4.94	4.54
3	С	Industri Pengolahan	11.53	11.02	10.46	10.25	10.11
4	D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.06	0.07	0.08	0.11
5	Е	Pengadaan Air	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09
6	F	Konstruksi	8.37	8.77	8.99	9.45	9.31
7	G	Perdagangan Besar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.11	14.77	14.29	14.68	14.90
8	Н	Transportasi dan Pergudangan	10.58	11.22	11.71	12.05	12.26
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.05	1.07	1.10	1.22	1.33
10	J	Informasi dan Komunikasi	5.56	5.26	5.20	4.79	4.87
11	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.16	3.15	3.10	3.12	3.18
12	L	Real Estate	1.92	1.93	1.95	2.01	2.01
13	M, N	Jasa Perusahaan	0.42	0.43	0.42	0.43	0.43
14	0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajih	6.39	6.29	6.10	5.43	5.84
15	Р	Jasa Pendidikan	3.46	3.69	3.69	3.71	3.91
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.32	1.34	1.32	1.26	1.26
17	R, S, T, U	Jasa Lainnya	1.51	1.62	1.62	1.64	1.79
	Produk	Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Sumatera Barat

Terjadinya penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2016 ini disebabkan beberapa hal yaitu :

- 1. Naiknya harga pembelian bahan baku, khususnya pada kelapa sawit dan karet seiring mulai pulihnya harga komoditas internasional;
- 2. Kenaikan TTL yang terjadi secara gradual selama triwulan III 2016 menambah tekanan biaya operasional perusahaan dan industri kecil menengah;
- 3. Adanya peningkatan kontribusi sektor lain terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat yaitu Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,90 persen) yang juga merupakan kinerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

4.2 Data Perkembangan Industri

Perkembangan industri kecil menengah di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan akhir tahun 2015 berdasarkan data sementara tercatat 18.731 unit usaha. Tenaga kerja industri kecil pada tahun 2015 berjumlah 70.181 orang, investasi industri kecil sebesar Rp. 1.163.667.594,- serta nilai produksi sebesar Rp. 12.512.656.883,-.

Perkembangan industri besar Provinsi Sumatera Barat sampai dengan akhir tahun 2014 berjumlah 46 unit usaha, tenaga kerja berjumlah 26.932 orang, nilai investasi sebesar Rp.22.066.364,- (Data tahun 2015 belum tersedia). Secara rinci perkembangan industri Sumatera Barat sejak tahun 2011-2015 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3
Perkembangan Industri di Sumatera Barat
Tahun 2011-2015

NO.	URAIAN	SATUAN			TAHUN		
NO.	UNIAN	URAIAN SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Unit Usaha						
	a. Industri Kecil Menengah	unit	34,397	31,637	32,218	24,841	18,731
	b. Industri Besar	unit	204	2,016	213	46	-
2	Tenaga Kerja						
	a. Industri Kecil Menengah	orang	128,891	120,138	128,820	103,912	70,181
	b. Industri Besar	orang	10,363	10,397	10,505	26,932	-
3	Nilai Investasi						
	a. Industri Kecil Menengah	Rp. 000	1,872,445,748	904,371,430	990,826,162	754,794,431	1,163,667,594
	b. Industri Besar	Rp. 000	1,772,808,862	2,416,694,895	2,480,338,774	22,066,364	-
4	Nilai Produksi						
	a. Industri Kecil Menengah	Rp. 000	9,998,248,283	4,265,336,727	5,644,321,813	5,812,078,078	12,512,656,883
	b. Industri Besar	Rp. 000	6,175,038,297	6,404,730,753	7,315,244,191	-	-

Sumber: Dinas Perindag Kab/Kota dan BKPMPPT Prov. Sumbar, data diolah

Dalam meningkatkan peranan sektor industri dalam perekonomian daerah, beberapa upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Memperkuat basis produksi melalui pendekatan sentra dan klaster melalui Program Pengembangan Perwilayahan Industri dengan kegiatan utama membina dan mengembangkan

- cabang industri yang memberikan sumbangan terbesar dalam PDRB Sumatera Barat, seperti Kegiatan Pengembangan Tenun Sumatera Barat, Pengembangan Produk Bordir/Sulaman Sumatera Barat, Pengembangan Produk dari Kulit dan Pengembangan Minyak Atsiri.
- 2. Memanfaatkan TPL binaan Kementerian Perindustrian dalam melakukan diagnosis pengembangan sentra serta menjadikannya sebagai database pengembangan dan pembinaan sentra selanjutnya, terutama dalam rangka peningkatan nilai produksi IKM dalam sentra binaan.

4.3 Data IKM yang difasilitasi Sertifikasi Standarisasi Produk Industri

Dengan telah disepakatinya perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diberlakukan sejak tahun 2015, Industri Kecil dan Menengah (IKM) Sumatera Barat harus siap bersaing menghadapi produk-produk asing yang masuk ke Indonesia khususnya ke Sumatera Barat. Salah satu upaya yang harus dilakukan IKM Sumatera Barat adalah meningkatkan kualitas produk dengan memberikan jaminan keamanan produk kepada konsumen melalui sertifikasi standarisasi produk.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 melakukan fasilitasi standarisasi yang diberikan kepada IKM, meliputi :

1. Fasilitasi Sertifikasi Halal

Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk pencantuman label halal. *Pada tahun 2016 jumlah sertifikat halal yang diberikan sebanyak 45 sertifikat halal*.

2. Fasilitasi HKI

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari bidang hukum yang secara luas mengacu pada ciptaan hasil olah pikir manusia dan melindungi kepentingan pencipta dengan memberi hak kepemilikan atas ciptaannya. Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua cabang yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta. *Adapun IKM yang difasilitasi untuk memperoleh HKI pada tahun 2016 berjumlah 50 IKM dengan fasilitasi HKI berupa merk*.

3. Fasilitasi MD

MD merupakan izin produk makanan yang diproduksi dalam negeri yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Label MD pada kemasan produk dikeluarkan berdasarkan lokasi pabrik, jenis produk, kandungan bahan produk dan kemasan. *Pada tahun 2016 telah difasilitasi sebanyak 35 IKM untuk mendapatkan label MD*.

Sebagai gambaran, jumlah IKM yang ada di Sumatera Barat berdasarkan data sementara dari kabupaten/kota tercatat sebanyak 18.731 unit usaha. Sampai dengan tahun 2016, jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi dan standariasi produk melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat tercatat sebanyak 520 unit usaha, berarti masih ada sebanyak 18.211 unit usaha atau sebesar 97,22 persen yang belum mendapatkan fasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk. Lebih lengkap jumlah IKM yang telah mendapatkan fasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk per kabupaten/kota sampai dengan tahun 2016 tergambar pada tabel berikut.

Tabel 4
Potret fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasiper Kabupaten/Kota
Sumatera Barat Kondisi Sampai dengan Tahun 2016

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah IKM	Fasilitasi Se	ertifikasi da s.d 20		isasi (2012	Total 2012 s.d
NO.	Kabupaten / Kota	Tahun 2016 *	Sertifikat Halal	HKI (Merk)	MD	ISO	2016
1.	Kabupaten Pesisir Selatan	1,600	14	21	2	-	37
2.	Kabupaten Pasaman	828	10	0	1	-	11
3.	Kabupaten Padang Pariaman	1,043	20	29	3	1	53
4.	Kabupaten Solok	510	8	26	1	-	35
5.	Kabupaten Sijunjung	705	10	26	-	-	36
6.	Kabupaten Agam	1,301	7	17	3	-	27
7.	Kabupaten Tanah Datar	2,316	12	21	-	-	33
8.	Kabupaten Lima Puluh Kota	517	18	24	2	-	44
9.	Kabupaten Dharmasraya	591	7	17	4	-	28
10.	Kabupaten Solok Selatan	543	9	0	-	-	9
11.	Kabupaten Pasaman Barat	1,291	2	4	2	-	8
12.	Kabupaten Kep. Mentawai	195	0	0	-	-	-
13.	Kota Payakumbuh	876	4	18	6	1	29
14.	Kota Solok	393	7	17	2	-	26
15.	Kota Padang	2,106	24	20	9	-	53
16.	Kota Pariaman	719	4	7	-	-	11
17.	Kota Sawahlunto	414	7	15	-	-	22
18.	Kota Padang Panjang	674	5	15	-	-	20
19.	Kota Bukittinggi	2,109	19	19	-	-	38
	Jumlah	18,731	187	296	35	2	520

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sumbar

4.4 Data Perkembangan Ekspor

Selama Januari-Desember 2016, total nilai ekspor non migas Sumatera Barat mencapai US\$. 1.708 juta, mengalami penurunan sebesar 2,28 persen dibanding periode yang sama tahun 2015, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5
Nilai Ekspor Non Migas Sumatera Barat Menurut Golongan Barang HS 2 Digit
Desember 2015 — Desember 2016

		Nilai FOB	(Juta US\$)	Perubahan
No	Golongan Barang	Januari- Desember 2015	Januari - Desember 2016	Januari-Desember 2016 Terhadap 2015
1	Lemak & minyak hewan /Nabati	1,207.7	1,177.1	(2.53)
2	Karet dan Barang dari Karet	362.7	358.9	(1.05)
3	Ampas/sisa industri makanan	25.9	23.4	(9.42)
4	Bahan bakar mineral	12.9	15.3	18.79
5	Berbagai produk kimia	22.6	28.9	27.87
6	Sari bahan samak & celup	4.7	13.3	185.58
7	Kopi, teh, rempah-rempah	28.2	24.0	(14.94)
8	Garam, belerang, kapur	19.4	19.5	0.82
9	Minyak atsiri, kosmetik wangi-wangian	8.7	8.4	(3.51)
10	Bahan-bahan nabati	13.2	21.0	59.41
	Total 10 Golongan Barang	1,705.8	1,689.8	(0.94)
	Lainnya	42.2	18.3	(56.67)
	Total Ekspor	1,748.0	1,708.1	(2.28)

Sumber: BPS Sumatera Barat, data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat, nilai ekspor terbesar adalah golongan lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US\$ 1.177,1 juta, disusul oleh golongan karet dan barang dari karet sebesar US\$ 358,9 juta.

Diketahui bahwa selama kurun waktu 2 tahun belakang, total nilai ekspor Sumatera Barat mengalami penurunan. Penurunan kinerja ekspor non migas Sumatera Barat ini disebabkan beberapa hal, yaitu :

- 1. Turunnya harga komoditas internasional terutama berasal dari penurunan nilai ekspor CPO dan karet yang mendominasi total ekspor Sumatera Barat.
- 2. Daya saing produk masih relatif rendah, yang meliputi mutu produk, kemasan, standar, merek barang olahan.
- 3. Kedatangan kapal yang belum sesuai kebutuhan pelaku ekspor;
- 4. Diversifikasi produk belum berkembang, masih didominasi barang setengah jadi;
- 5. Negara tujuan ekspor sebahagian besar masih terpaut ke negara tujuan tradisional;
- 6. Kapasitas produksi terbatas dan tidak kontinyu.

Untuk meningkatkan kinerja ekspor non migas Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya sebagai berikut :

- Melakukan pemberdayaan terhadap pelaku IKM (teknis dan permodalan) sehingga produk bisa lebih berkualitas, berproduksi secara kontinyu, memenuhi standar yang ditentukan, merek terdaftar, memiliki label halal, dan kemasan yang lebih baik;
- 2. Pengembangan Produk dan Akses Pasar melalui penciptaan brand, identifikasi potensi ekspor, dan pengembangan produk;
- 3. Melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non tradisional, melalui kegiatan-kegiatan promosi (pameran/misi dagang) untuk memperkenalkan produk-produk potensial Sumatera Barat ke wilayah pasar tersebut.
- 4. Pengetatan pengawasan penggunaanSurat Keterangan Asal (SKA) barang dari negara mitra FTA, guna melindungi produk dalam negeri;
- 5. Meningkatkan upaya fasilitasi kepada dunia usaha/UKM eksportir dalam bentuk pelatihan-pelatihan ekspor, pengembangan pasar komoditi Sumatera Barat ke luar negeri, dan pelatihan-pelatihan teknik peningkatan daya saing lainnya. Disamping itu perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus tentang regulasi-regulasi baru yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya ketentuan dan peraturan-peraturan yang terbaru di bidang ekspor.

Sementara itu, berdasarkan negara tujuan ekspor diketahui bahwa selama tahun 2016 ekspor terbesar adalah ke negara India yaitu sebesar US\$ 653,5 juta, selanjutnya ke negara Amerika Serikat sebesar US\$ 342,1 juta, negara Singapura sebesar US\$ 200,6 juta dan ke Bangladesh sebesar US\$ 68,3 ,8 juta, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Nilai Ekspor Non Migas Sumatera Barat Menurut Negara Tujuan
Desember 2015 — Desember 2016

		Nilai FOB	(Juta US\$)	Perubahan
No	Negara Tujuan	Januari- Desember 2015	Januari - Desember 2016	Januari-Desember 2016 Terhadap 2015*)
1	India	653.7	653.5	(0.04)
2	Amerika Serikat	328.3		4.20
3	Singapura	179.5	200.6	11.75
4	Tiongkok	43.5	58.6	34.85
5	Belanda	47.6	50.1	5.35
6	Bangladesh	81.9	68.3	(16.68)
7	Selandia Baru	21.9	13.4	(38.56)
8	Inggris	30.2	43.5	43.96
9	Myanmar	8.1	32.2	295.76
10	Jepang	17.7	18.4	4.23
	Total 10 Negara Tujuan	1,412.4	1,480.7	4.84
	Lainnya	335.6	227.4	(32.23)
	Total Ekspor	1,748.0	1,708.1	(2.28)

Sumber: BPS Sumatera Barat, data diolah

4.5 Data Perkembangan Impor

Perkembangan impor non migas Sumatera Barat secara kumulatif Januari s.d Desember 2016 mencapai US\$ 345,2 juta atau mengalami penurunan sebesar 45,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7
Nilai Impor Sumatera Barat Menurut Golongan Barang HS 2 Digit
Desember 2015 – Desember 2016

		Nilai CIF (Perubahan Januari-	
No	Golongan Barang	Januari- Desember 2015	Januari - Desember 2016*)	Desember 2016 Terhadap 2015*)
1	Bahan Bakar Mineral	541.9	273.7	(49.50)
2	Pupuk	29.6	21.3	(28.10)
3	Garam, belerang dan kapur	14.8	6.9	(53.40)
4	Kertas/Karton	5.2	5.6	7.60
5	Mesin-mesin/Peralatan Mekanik	5.0	5.6	12.10
	Total 5 Golongan Barang	596.7	313.2	(47.50)
	Lainnya	36.1	32.0	(11.37)
	Total Impor	632.8	345.2	(45.44)

Sumber: BPS Sumatera Barat, data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari lima golongan barang utama impor selama tahun 2016 yang terbesar adalah golongan bahan bakar mineral yaitu US\$ 273,7 juta, berikutnya golongan pupuk sebesar US\$ 21,3 juta dan golongan garam, belerang dan kapur sebesar US\$ 6,9 juta (data sementara).

Sementara itu, nilai impor Sumatera Barat berdasarkan nilai impor non migas menurut negara asal, mulai Desember 2015 sampai dengan Desember 2016 terlihat menurun. Perkembangan impor Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8
Nilai Impor Sumatera Barat Menurut Negara Asal
Desember 2015 - Desember 2016

		Nilai CIF (Perubahan Januari-	
No	Negara	Januari- Desember 2015	Januari - Desember 2016*)	Desember 2016 Terhadap 2015*)
1	Singapura	435.6	227.8	(47.72)
2	Kanada	12.0	8.3	(30.52)
3	Oman	2.8	4.5	59.40
4	Malaysia	116.2	48.0	(58.70)
5	Swedia	2.9	2.3	(19.77)
	Total 5 Golongan Barang	569.6	291.0	(48.92)
	Lainnya	63.1	54.3	(14.09)
	Total Impor	632.8	345.2	(45.44)

Sumber: BPS Sumatera Barat, data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa impor selama 2016 terbesar Sumatera Barat berasal dari negara Singapura sebesar US\$ 227,8 juta, diikuti oleh negara Malaysia sebesar US\$ 48 juta, Kanada US\$ 8,3 juta, Oman US\$ 4,5 juta, dan Swedia US\$ 2,3 juta.

4.6 Data Perkembangan SIUP dan TDP

Sejak tahun 2011 penerbitan SIUP dan TDP telah dilakukan oleh Pelayanan Satu Pintu dimasing-masing Kabupaten/Kota. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini hanya bertugas melaksanakan pembinaan dalam bentuk pengawasan dan pemberian bimbingan kepada petugas penerbitan SIUP dan TDP yang ada di Badan Pelayanan Satu Pintu di 19 kab/kota. Setiap bulannya petugas data dari Badan Pelayanan Satu Pintu akan mengirimkan data perkembangan penerbitan SIUP dan TDP ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Melalui data SIUP dan TDP inilah diketahui berapa jumlah unit usaha perdagangan yang tumbuh di kabupaten/kota Sumatera Barat.

Berdasarkan data yang sudah dihimpun oleh Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, selama tahun 2016 diketahui telah diterbitkan sebanyak 8.005 buah SIUP, jumlah ini meningkat bila dibandingkan tahun lalu dimana pada tahun 2015 diterbitkan sebanyak 6.901 buah SIUP. Secara terinci perkembangan penerbitan SIUP di 19 kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9
Jumlah Penerbitan SIUP di Sumatera Barat Tahun 2016

No.	Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	РВ	PM	PK	Mikro	Jumlah <i>Total</i>
	Kabupaten/ Regency					
1.	Agam	1	17	245	-	263
2.	Lima Puluh Kota	-	20	262	163	445
3.	Pasaman	-	22	352	106	4 80
4.	Padang Pariaman	-	-	165	38	203
5.	Solok	-	27	305	89	421
6.	Sijunjung	-	22	352	106	480
7.	Pesisir Selatan	-	18	620	-	638
8.	Tanah Datar	-	22	268	70	360
9.	Kep. Mentawai	-	40	6	-	46
10.	Pasaman Barat	10	39	532	386	967
11.	Dharmasraya	3	47	301	19	370
12.	Solok Selatan	2	25	154	56	237
	Kota <i> City</i>					
13.	Padang	22	277	1,288	149	1,736
14.	Padang Panjang	1	17	85	5	108
15.	Bukittinggi	-	24	289	91	404
16.	Payakumbuh	1	13	148	46	208
17.	Solok	1	37	161	16	215
18.	Sawahlunto	1	38	144	-	183
19.	Pariaman	1	22	203	15	241
	Jumlah/Total 2016	43	727	5,880	1,355	8,005

Sumber: Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindag Sumbar

Dari data diatas diketahui bahwa SIUP yang banyak diterbitkan pada tahun 2016 adalah untuk Perusahaan Kecil yaitu sebanyak 5.880 buah SIUP, selanjutnya Usaha Mikro sebanyak 1.355 buah, Perusahaan Menengah sebanyak 727 buah dan Perusahaan Besar sebanyak 43 buah. Untuk perkembangan penerbitan TDP di kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10
Jumlah Penerbitan TDP di Sumatera Barat Tahun 2016

NI.	Kabupaten/Kota		Bentul	(Usaha / I	Form of Bu	ısiness		Jumlah
No.	Regency/City	PT	Kop.	CV	Fa.	PO	BUL	Total
	Kabupaten/Regency							
1.	Agam	45	6	92	-	219	-	362
2.	Lima Puluh Kota	33	6	65	-	-	-	104
3.	Pasaman	26	-	169	-	225	2	422
4.	Padang Pariaman	36	3	88	-	164	-	291
5.	Solok	30	3	141	-	244	3	421
6.	Sijunjung	19	2	123	1	304	-	449
7.	Pesisir Selatan	24	16	313	-	127	-	480
8.	Tanah Datar	38	9	111	-	341	1	500
9.	Kep. Mentawai	4	-	27	-	15	-	46
10.	Pasaman Barat **							-
11.	Dharmasraya	38	8	151	-	224	6	427
12.	Solok Selatan	16	1	50	-	185	-	252
	Kota/ <i>City</i>							
13.	Padang	680	42	695	-	452	5	1,874
14.	Padang Panjang	21	5	37	-	59	-	122
15.	Bukittinggi	63	2	106	1	403	-	575
16.	Payakumbuh	41	-	76	-	185	-	302
17.	Solok	34	1	110	-	101	-	246
18.	Sawahlunto	26	-	81	-	40	-	147
19.	Pariaman	23	3	116	-	132	-	274
	Jumlah/ Total 2016	1,197	107	2,551	2	3,420	17	7,294

Sumber: Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindag Prov. Sumbar

Berdasarkan data diatas diketahui TDP yang banyak diterbitkan adalah untuk usaha berbentuk PO yaitu sebanyak 3.420 buah, selanjutnya CV sebanyak 2.551 buah, PT sebanyak 1.197 buah, Koperasi sebanyak 107 buah, dan BUL sebanyak 17 buah.

4.7 Data Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditi Agro

Sebagaimana diketahui, kegiatan pasar lelang adalah merupakan salah satu upaya untuk menjembatani berbagai kepentingan petani dan pembeli yang bergerak dalam kegiatan usaha hasil pertanian yang bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang lebih baik melalui transparansi mekanisme pembentukan harga dan peningkatan efisiensi pemasaran serta mampu mempertemukan berbagai kepentingan pembeli dan penjual sehingga dapat menguntungkan semua pihak.

Manfaat adanya pasar lelang lokal, antara lain yaitu : terciptanya transparansi mekanisme pembentukan harga ditingkat lokal, meningkatkan posisi rebut tawar petani, mendorong peningkatan mutu dan produksi, meningkatkan efisiensi tata niaga, meningkatkan pendapatan petani.

Melalui kegiatan pelaksanaan pasar lelang pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Bidang Perdagangan Dalam Negeri, sampai dengan bulan Desember 2016 telah melaksanakan sebanyak 9 kali Pasar Lelang hasil komoditi pertanian dengan total nilai transaksi sebesar Rp. 14.616.725.000,-. Data perkembangan Pasar Lelang yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11
Rekapitulasi Pasar Lelang Komoditi Tahun 2016

No.	Pelaksanaan Lelang	Jumlah Peserta	Nilai Transaksi (Rp.)
		Lelang	
1	16 Februari 2016	100	3,280,110,000.00
2	29 Maret 2016	100	1,486,470,000.00
3	12 April 2016	100	1,831,660,000.00
4	10 Mei 2016	100	1,373,660,000.00
5	19 Juli 2016	100	1,723,520,000.00
6	9 Agustus 2016	100	1,519,800,000.00
7	6 September 2016	100	865,870,000.00
8	4 Oktober 2016	100	1,152,260,000.00
9	1 Desember 2016	100	1,383,375,000.00
	Total	900	14,616,725,000.00

Sumber: Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindag Sumbar

Secara kumulatif sejak tahun 2006 sampai dengan 2016, telah dilakukan sebanyak 106 kali Pasar Lelang hasil komoditi pertanian dengan total nilai transaksi sebesar Rp. 173.278.430.300,-.

4.8 Data Perkembangan Kemetrologian (Tera dan Tera Ulang)

Pelaksanaan tera/tera ulang dilakukan untuk melindungi kepentingan umum (produsen dan konsumen) terhadap adanya jaminan kebenaran ukuran, sehingga diharapkan terciptanya tertib ukur, tertib timbang dan tertib niaga disegala bidang serta mekanisme pelayaanan/pemeriksaan UTTP pada pemilik/pemakai UTTP dengan baik. Perkembangan kegiatan Tera dan Tera Ulang dapat dilihat pada tabel berikut trend waktu 2012 s.d 2016 :

Tabel 12
Perkembangan Data Tera dan Tera Ulang UPTD Balai Metrologi
Tahun 2012-2016

No	Urajan		Tahun			
NO	Uraiaii	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah UTTP	26,334	26,710	25,722	19,679	16,656
2.	Jumlah Pemilik/Pemakai UTTP	6,772	7,572	7,289	5,636	5,009
3.	Jumlah Retribusi Tera (Rp. Juta)	359	362	383	474	332.8

Sumber: UPTD Balai Metrologi, data diolah

Wujud nyata dari pelaksanaan tera/tera ulang yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka untuk melindungi kepentingan umum (konsumen dan produsen) adalah dengan lebih aktif lagi melakukan pengawasan dan bekerja sama dengan kepolisian setempat, serta melakukan penyelidikan terhadap pemilik UTTP yang melanggar UU RI No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Pengawasan pemakaian alat UTTP penting dilakukan karena masih banyak pemilik/pemakai alat UTTP yang tidak meneraulangkan UTTP-nya. Data tera dan tera ulang secara rinci dapat dilihat pada lampiran 4 laporan ini.

4.9 Data Perkembangan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Dalam rangka pembinan dan pengawasan terhadap mutu komoditi ekspor, telah dilakukan pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang oleh UPTD BPMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Komoditi - komoditi yang diterapkan pengawasan mutunya secara wajib tersebut sebanyak 18 jenis komoditi dan yang terdapat di Sumatera Barat seperti Cassia Indonesia, Minyak Pala, Biji Pinang, Biji Kopi, Minyak Nilam, Biji Kakao, Fuli, Minyak Akar Wangi, dan seterusnya. Pengawasan terhadap produk ekspor tersebut dilakukan dengan dua cara melalui Sertifikat Mutu (SNI) atau Sertifikat Kesesuaian Mutu (Certificate of Comformity) dan Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI).

Perkembangan pengujian dan sertifikasi mutu barang yang dilakukan oleh UPTD BPMB Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat tersebut selengkapnya terurai pada tabel berikut :

Tabel 13
Perkembangan Penerbitan Sertifikat Mutu
Tahun 2012-2016

No.	Komoditi / Commodity	Tahun/Year (set)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Cassia Indonesia / Cassia	1,210	1,282	1,252	1,228	1,171
2.	Minyak Pala / Nutmeg Oil	36	43	47	56	57
3.	Biji Pinang / Betel Nut	94	131	134	111	78
4.	Biji Kopi / Coffee Beans	4	6	11	14	35
5.	Minyak Nilam / Patchouli Oil	21	15	14	13	12
6.	Biji Kakao / Cocoa Beans	289	307	94	13	12
	-	269	307	94	-	-
7.	Fulli (Mace)	-	-	-	-	-
8.	Minyak Akar Wangi/Vetiver oil	2	-	-	2	-
9.	Minyak Sereh Wangi	5	-	-	2	-
10.	Minyak Cengkeh/Clove oil	1	-	-	-	
11.	Minyak Daun Cengkeh	1	-	-	-	
12.	Biji Pala/Nutmeg	1	1	-	1	-
13.	Lada Putih/White pepper	1	1	-	-	-
14.	Minyak Cendana	-	2	-	1	-
14.	Minyak Kruing	-	1	-	-	-
15.	Minyak Lengkuas	-	1	-	-	-
16.	Minyak Kenanga	-	-	1	-	-
17.	Cardamon	-	-	1	-	-
18.	Cengkeh	-	-	-	-	2
	Jumlah / Total	1,665	1,790	1,554	1,428	1,355

Sumber: UPTD BPMB, data diolah

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai target kinerja pembinaan yang dilakukan pada Sektor Industri dan Sektor Perdagangan selama tahun anggaran 2016, sehingga dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya dapat lebih terarah dan terukur.

5.1 Kesimpulan

Laporan Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Didalamnya diuraikan tentang pelaksanaan program dan kegiatan oleh masing-masing bidang dan UPTD yang ada dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat selama tahun anggaran 2016. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing bidang dan UPTD tahun anggaran 2016 telah berjalan dengan baik. Dari 10 bidang dan UPTD, tidak ada yang serapan keuangannya diatas 95 persen. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
- 2. Terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah :
 - a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. Pagu dana Rp. 36.336.000 dengan serapan sebesar Rp. 5.330.000,- atau 14,67% dan fisik kegiatan 50%. Kegiatan ini bersifat memenuhi undangan untuk mengikuti sosialisasi dan sejenisnya. Rendahnya serapan anggaran dan fisik kegiatan disebabkan pemakaian sesuai dengan undangan yang masuk ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Pagu dana Rp. 257.040.000,- dengan serapan sebesar Rp. 123.035.106,- atau 47,87% dan fisik kegiatan 65%. Rendahnya serapan anggaran dan fisik kegiatan disebabkan tidak semua bimbingan teknis yang bisa diikuti karena tidak sesuai dengan tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Pengembangan Produk Bordir/Sulaman Sumatera Barat, realisasi fisik 85% dan realisasi keuangan 58,41%. Rendahnya realisasi keuangan dan fisik kegiatan disebabkan tidak terlaksananya keikutsertaan pada event International Ethnical Fashion akibat adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
 - d. Pembuatan Prototipe Teknologi Tepat Guna Alsintan, realisasi fisik 85 % dan realisasi keuangan 75,02%. Pada kegiatan ini terdapat sosialisasi prototipe di 5 Kab/Kota yang tidak dapat terlaksana karena adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
 - e. Temu Usaha dan Sosialisasi Pengembangan Produk Komoditi Ekspor, realisasi fisik 90% dan realisasi keuangan 70,36%. Rendahnya realisasi keuangan dan fisik kegiatan disebabkan adanya sisa transportasi peserta (menyesuaikan zona), penyesuaian honorarium narasumber

- dan tidak terlaksananya 1 sub kegiatan temu usaha akibat adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
- f. Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Komoditi Ekspor, realisasi fisik 65% dan realisasi keuangan 38,21%. Rendahnya realisasi keuangan dan fisik kegiatan disebabkan tidak terlaksananya bimbingan teknis di Kota Pariaman akibat adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
- g. Penyusunan Data Pasar Tradisional di Sumatera Barat, realisasi fisik 75% dan realisasi keuangan 73,60%. Rendahnya realisasi keuangan dan fisik kegiatan disebabkan adanya sisa cetak buku.
- h. Monev Distribusi Pupuk Bersubsidi, realisasi fisik 65% dan realisasi keuangan 45,76%. Rendahnya realisasi keuangan dan fisik kegiatan disebabkan tidak terlaksananya 1 kali monev ke 17 Kab/Kota akibat adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
- Peningkatan Promosi IKM di Luar Sumatera Barat, realisasi fisik 91% dan realisasi keuangan 82,73%. Rendahnya realisasi keuangan dan fisik kegiatan disebabkan tidak terlaksananya 1 kali pameran akibat adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
- j. Pengembangan Pasar Komoditi Lokal melalui Pasar Lelang Luar Provinsi, realisasi fisik 85% dan realisasi keuangan 79,43%. Rendahnya realisasi keuangan dan fisik kegiatan disebabkan tidak terlaksananya 1 kali lelang akibat adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah.
- 3. Persoalan yang terkait perindustrian antara lain:
 - Daya saing produk IKM yang masih rendah (kualitas, desain, harga, kemasan, dan kontinuitas produksi).
 - Masih terbatasnya kemampuan pemasaran sebagian besar industri Sumatera Barat dan permodalan juga masih lemah.
 - Keakuratan data industri dari kabupaten/kota masih lemah.
- 4. Persoalan yang terkait perdagangan antara lain:
 - Ekspor masih terkosentrasi pada beberapa komoditi tertentu, barang setengah jadi dan beberapa negara tujuan tertentu.
 - Ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang belum memadai, seperti pasar tradisional yang perlu direhabilitasi, pusat kuliner dan lain-lain.
 - Terbatasnya kewenangan provinsi untuk membiayai sarana pasar.

5.2 Rekomendasi

Secara umum, pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan oleh masing-masing bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat lebih baik lagi. Hal-hal yang perlu diperbaiki adalah:

- 1. Melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan penganggaran dengan baik, sehingga serapan anggaran berjalan dengan optimal.
- 2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan tiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) oleh masing-masing bidang dan UPTD pelaksana yang menjadi pelaksana tugas teknis tiap indikator kinerja tersebut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

- 3. Menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang menghambat daya saing produk IKM, melalui pelatihan dan dan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi produk.
- 4. Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku dalam kuantitas, kualitas dan harga bersaing, yang nantinya dapat meningkatkan nilai tambah produk industri untuk dijadikan produk ekspor.
- 5. Memacu pertumbuhan sektor perdagangan dengan memperkuat Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.
- 6. Mengembangkan ekspor daerah dengan meningkatkan kerjsama dan koordinasi dengan pihak terkait.

Sebagai sebuah gambaran kinerja masing-masing bidang dan UPTD, Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menyajikan keseluruhan capaian kinerja bidang dan UPTD dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 masih belum sempurna. Semoga Laporan Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 ini dapat menjadi referensi yang representativ serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dan dapat menjadi acuan bagi perbaikan kinerja di tahun berikutnya.